

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Akuntansi (M. Ak) Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

NUNUNG SRI WAHYUNI

NPM : 1720050023

Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(Study Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)

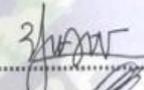
NUNUNG SRI WAHYUNI

1720050023

KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Thesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dinyatakan Lulus dalam Ujian Thesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Pada Hari Kamis, 21 Maret 2019

Panitia Penguji

1. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA
Pembimbing I 1. 
2. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si
Pembimbing II 2. 
3. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA
Penguji 3. 
4. Dr. IRFAN, S.E., M.M
Penguji 4.
5. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.
Penguji 5.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : NUNUNG SRI WAHYUNI
NPM : 1720050023
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Judul Tesis : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN (Studi Pada Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Seminar Hasil

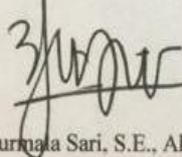
Medan, Maret 2019

UMSU

Komisi Pembimbing

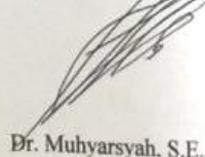
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEMBIMBING I



Dr. Eka Nurmana Sari, S.E., Ak., CA.

PEMBIMBING II



Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Maret 2019

Penulis

NUNUNG SRI WAHYUNI
NPM. 1720050023

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Utara)**

ABSTRAK

**NUNUNG SRI WAHYUNI
1720050023**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Objek pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Sampling menggunakan metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendistribusian kuesioner. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis jalur dan data diproses menggunakan perangkat lunak statistik SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sub-struktur 1, SPIP tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Sementara ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Dan secara simultan SPIP dan ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya dalam sub-struktur 2, secara parsial SPIP dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan ketersediaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi secara simultan, SPIP, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan

***THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND
AVAILABILITY OF BUDGET ON THE EFFECTIVENESS OF THE
IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION
SYSTEMS AND IT'S IMPACT ON QUALITY FINANCIAL
STATEMENTS
(Studies in Provincial and District / City Governments of North Sumatra)***

ABSTRACT

***NUNUNG SRI WAHYUNI
1720050023***

This research aims to discover, test and analyze the influence of SPIP (Government Internal Control Systems) and the availability of the budget against the effectiveness of the implementation of the regional financial information systems and its impact on the quality of financial statement either partially or simultaneous. The research method used is the analysis of quantitative data. The object of this research is all over the local government in the province of North Sumatra. Sampling method is saturated sampling. The technique of data collection was done through the distribution of questionnaires. While the techniques of data analysis is path analysis and the data is processed using SPSS statistics software.

The results showed that in sub-structure 1, SPIP does not affect the effectiveness of the implementation of the regional financial information systems. While the availability of the budget affects the effectiveness of the implementation of the regional financial information systems. And simultaneously SPIP and the availability of the budget affects the effectiveness of the implementation of the regional financial information systems. Next in sub-structure 2, partially SPIP and the effectiveness of the implementation of the regional financial information systems effect on the quality of the financial statements, while the availability of budget does not affect the quality of the financial statements. But simultaneously, SPIP, the availability of budget and effectiveness of the implementation of the regional financial information systems effect on the quality of financial statements.

Keywords : Government Internal Control Systems, The Availability of Budget, The Effectiveness of the Implementation of the Regional Financial Information Systems, The Quality of Financial Statements.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, Amin.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tahapan di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusunlah tesis yang diberi judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara)”**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orangtua dan ananda tercinta “Adrian Rangga Bukhori Siregar”, karena mereka adalah semangat dan inspirasi buat penulis untuk memberikan yang terbaik.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Kaiman Turnip, M.Si selaku Kepala Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai pimpinan di instansi tempat penulis bertugas.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga kepada tahap akhir perkuliahan ini.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Komisi Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Ibu Dr. Maya Sari, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. dan Bapak Dr. Irfan, S.E.,M.M, selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis sampai pada tahap ini.
9. Bapak dan Ibu segenap staf di Biro Akademik Pascasarjana yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan dari awal hingga akhir.
10. Segenap keluarga besar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini
11. Orang-orang terkasih yang amat membantu penulis dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini (Keluarga besar Opung Jihan, Afdil, Tiwi.Cs, Heri, Acai, Fira, Kiwin, Kelas ASP 17 dan segenap keluarga besar penulis).
12. Segenap rekan-rekan angkatan Maksi Tahun 2017 yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan sampai dengan tahap ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sehingga bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Medan, Maret 2019
Penulis,

Nunung Sri Wahyuni
NPM. 1720050023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Kajian Teoritis	23
1. Kualitas Laporan Keuangan	23
2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	31
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	37
4. Ketersediaan Anggaran	42
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Konseptual	49
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	49

2. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	51
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	52
4. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	54
5. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	55
6. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	57
D. Hipotesis	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan Penelitian	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	62
D. Defenisi Operasional	62
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (x_1)	63
2. Ketersediaan Anggaran (x_2)	64
3. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (y_1)	64
4. Kualitas Laporan Keuangan (y_2)	66
E. Teknik Pengumpulan Data	68
1. Uji Validitas	69
2. Uji Reliabilitas	68

F.	Teknik Analisis Data	73
1.	Analisis Statistik Deskriptif	73
2.	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		80
A.	Hasil Penelitian	80
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
2.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	81
3.	Deskriptif Variabel Penelitian	83
4.	Analisis Deskriptif	90
5.	Uji Normalitas	92
6.	Analisis Korelasi Antar Variabel	93
7.	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	95
8.	Uji Hipotesis	97
B.	Pembahasan	101
1.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	101
2.	Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	103
3.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	106
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	107
5.	Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	110

6. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	111
7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Ketersediaan Anggaran dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	114
8. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1. Opini LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2017	6
Tabel I-2. Penyampaian LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	8
Tabel I-3. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018	10
Tabel I-4. Daftar Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	12
Tabel I-5. Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan Dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan	13
Tabel I-6. Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan Dengan Kelemahan SPIP	15
Tabel I-7. Keaslian Penelitian	21
Tabel II-1. Penelitian Terdahulu	46
Tabel III-1. Rencana Waktu Penelitian	61
Tabel III-2. Defenisi Operasional	67
Tabel III-3. Bobot Skala Likert	69
Tabel III-4. Hasil Uji Validitas	71
Tabel III-5. Hasil Uji Reliabilitas	72
Tabel III-6. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	76
Tabel III-7. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	78
Tabel IV-1. Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara	80
Tabel IV-2. Rekapitulasi Tingkat Pengembalian Kuesioner	81
Tabel IV-3. Karakteristik Responden	82

Tabel IV-4.	Profil / Gambaran Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara	83
Tabel IV-5.	Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden	84
Tabel IV-6.	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	85
Tabel IV-7.	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Ketersediaan Anggaran	86
Tabel IV-8.	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	88
Tabel IV-9.	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kualitas Laporan Keuangan.....	90
Tabel IV-10.	Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1), Ketersediaan Anggaran (X_2), dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Y_1)	91
Tabel IV-11.	Analisis Korelasi Antar Variabel	93
Tabel IV-12.	Hasil Analisis Jalur <i>R Square</i> Regresi Sub-Struktur 1	95
Tabel IV-13.	Hasil Analisis Jalur <i>Coefficients</i> Regresi Sub-Struktur 1	96
Tabel IV-14.	Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	97
Tabel IV-15.	Hasil Analisis Jalur <i>R Square</i> Regresi Sub-Struktur 2	98
Tabel IV-16.	Hasil Analisis Jalur <i>Coefficients</i> Regresi Sub-Struktur 2	98

Tabel IV-17	Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	100
Tabel IV-18.	Hasil Uji t Regresi Sub-Struktur 1	101
Tabel IV-19.	Hasil Uji t Regresi Sub-Struktur 2	102
Tabel IV-20.	Hasil Uji F Regresi Sub-Struktur 1	103
Tabel IV-21.	Hasil Uji F Regresi Sub-Struktur 2	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Grafik Opini LKPD 2017	5
Gambar I.2. Perkembangan Opini LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017	7
Gambar I.3. Komposisi Waktu Penyampaian LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	9
Gambar II.1. Hubungan Antar Variabel Dalam Penelitian	59
Gambar III.1. Hubungan Struktural Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan	74
Gambar III.2. Sub Struktur 1. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	75
Gambar III.3. Sub Struktur 2. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	77
Gambar IV.1. Grafik Normal P-Plot	92
Gambar IV.2. Hasil Pengujian Sub Struktur 1. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	97
Gambar IV.3. Hasil Pengujian Sub Struktur 2. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah mengenai perubahan prinsip sentralisasi menjadi desentralisasi pada era otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, yang berakibat terhadap perkembangan pengelolaan administrasi publik. Dengan adanya pelaksanaan desentralisasi diharapkan setiap daerah semakin efisien dan efektif dalam mengatur proses pembangunannya karena daerah mendapat pelimpahan wewenang dan kebebasan yang luas untuk mengatur kebijakan-kebijakan penting demi kemajuan daerahnya (Syarifudin, 2014).

Konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (P. R. Indonesia, 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu perubahan mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan konsep otonomi daerah adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana organisasi sektor publik umumnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan dalam melaksanakan pelayanan publik. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Regulasi tersebut menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola keuangan daerah dan menghasilkan laporan keuangan yang bersifat transparansi dan memiliki akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebagai perwujudan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Kementerian Keuangan RI, 2018). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006)

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Herawati, 2014). Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya (I. A. Indonesia, 2012).

Laporan keuangan pada sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintahan merupakan bentuk transparansi sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas yaitu berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public (Mardiasmo, 2009). Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik / masyarakat sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar dan berkualitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (P. R. Indonesia, 2003) Pasal 31 ayat (1) menyatakan Gubernur/ Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (P. R. Indonesia, 2005b) yang ditetapkan sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa jenis laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka pertanggungjawaban APBD meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, PP Nomor 58 Tahun 2005 juga mempertegas batas waktu penyusunan dan pemeriksaan LKPD,

dimana LKPD harus disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

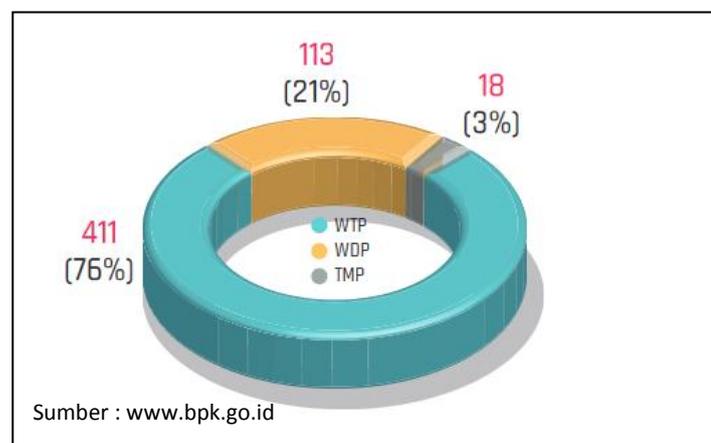
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (P. R. Indonesia, 2010) menyatakan terdapat empat karakteristik sebagai prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki terdiri dari : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dan untuk dapat mengetahui kualitas laporan keuangan tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh BPK (Sari, 2015).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari pemeriksaan auditor yang memberikan opini tentang penyajian laporan keuangan suatu organisasi. Menurut (Kaimenakis, Cohen Sandra, 2011) dalam (Sari, 2015) bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak hanya harus sesuai dengan standar akuntansi, tetapi pada saat yang sama laporan keuangan harus disertai dengan laporan auditor eksternal mengenai komentar terhadap kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan sangat penting agar laporan keuangan lebih informatif. Laporan audit dilampirkan pada laporan keuangan tahunan yang mengandung informasi yang berguna sehubungan dengan kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi.

Fenomena tentang rendahnya kualitas laporan keuangan dikemukakan oleh (Nazir, 2009) yang menyatakan bahwa BPK-RI menilai kualitas Laporan

Keuangan Daerah dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Brodjonegoro, 2009) yang menyatakan bahwa memasuki tahun kesembilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kabar buruk belum mau menjauh dari proses yang telah membuat Indonesia menjadi sangat berbeda dibanding era sebelum tahun 2000. Kabar buruk tersebut adalah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disajikan oleh BPK, trend opini yang diberikan BPK terhadap LKPD cenderung mengalami peningkatan. IHPS Semester I Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPK memuat hasil pemeriksaan terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).. Dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan, BPK memberikan 411 Opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%) dan 18 opini TMP (3%). Grafik perolehan Opini LKPD disajikan dalam grafik berikut :



Gambar I-1.
Grafik Opini LKPD Tahun 2017

Dengan melihat fenomena tentang kualitas LKPD saat ini, Gamawan Fauzi (Fauzi, 2011) mengemukakan kendati kualitas laporan keuangan sektor publik mengalami peningkatan, namun Kementerian Dalam Negeri menilai dari

sisi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah masih banyak ditemukan kelemahan. Hal senada juga dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (Mulyani, 2016) yang menyatakan agar Pemerintah Daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat WTP dari hasil audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK, karena kenyataannya meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

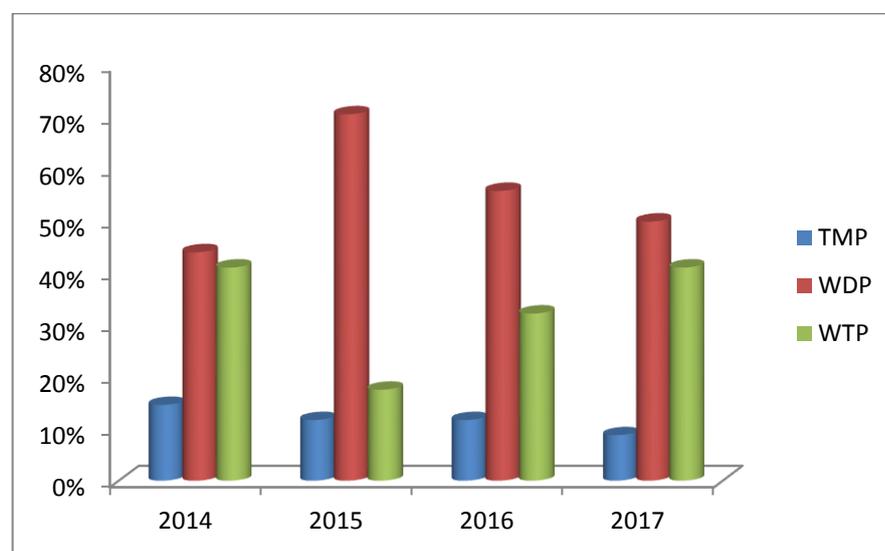
Data perolehan opini LKPD di Sumatera Utara yang diberikan oleh BPK dari tahun 2014 – 2017 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I-1. Opini LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2017

No	Pemerintah Daerah	Perolehan Opini atas LKPD			
		2014	2015	2016	2017
1	Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Asahan	WTP	WDP	WDP	WTP
3	Kabupaten Batubara	TMP	WDP	WDP	WDP
4	Kabupaten Dairi	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Deli Serdang	WDP	TMP	WDP	WDP
6	Kabupaten Humbang Hansudutan	WTP	WDP	WTP	WTP
7	Kabupaten Karo	WDP	WDP	TMP	WDP
8	Kabupaten Labuhan Batu	WTP	WDP	WDP	WDP
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Langkat	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kabupaten Mandailing Natal	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kabupaten Nias	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Kabupaten Nias Barat	TMP	WDP	TMP	TMP
15	Kabupaten Nias Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP
16	Kabupaten Nias Utara	TMP	WDP	WDP	WDP
17	Kabupaten Padang Lawas	TMP	WDP	WDP	WDP
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	WDP	WDP	WDP	WTP
19	Kabupaten Pakpak Bharat	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kabupaten Samosir	WDP	TMP	WDP	WTP
21	Kabupaten Serdang Bedagai	WTP	WDP	WDP	WDP
22	Kabupaten Simalungun	WDP	WDP	WDP	TMP
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP
25	Kabupaten Tapanuli Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kabupaten Toba Samosir	WDP	WDP	WTP	WTP
27	Kota Binjai	WDP	WDP	WTP	WTP
28	Kota Gunung Sitoli	WDP	WDP	WDP	WDP
29	Kota Medan	WTP	WDP	WDP	WDP
30	Kota Padangsidempuan	WDP	WDP	WDP	WDP
31	Kota Pematangsiantar	WTP	WDP	WTP	WTP
32	Kota Sibolga	WTP	TMP	TMP	WDP
33	Kota Tanjung Balai	WDP	WDP	WDP	WDP
34	Kota Tebing Tinggi	WTP	WDP	WTP	WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014 – 2017 (www.bpk.go.id)

Fenomena atas kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan, karena masih ada Pemerintah Daerah yang tetap hanya bertahan dengan opini WDP selama empat tahun berturut-turut dan bahkan masih ditemukan Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP dan dari WDP menjadi TMP. Grafik perolehan Opini LKPD Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam grafik berikut :



Gambar II-2.
Perkembangan Opini LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2017

Ismayaton (2017) mengemukakan bahwa BPK masih menemukan sejumlah masalah pada laporan keuangan masing-masing Pemda. Hingga batas akhir waktu penyampaian LKPD, hanya 30 pemerintah kabupaten/kota yang sudah menyerahkan LKPD dan masih ada 3 kabupaten/kota yang belum menyampaikan LKPD tersebut kepada BPK. Dari angka tersebut, 21 daerah dan Pemprov telah mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK, sementara laporan keuangan 9 daerah lainnya masih dalam proses audit. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan tentang LKPD di Sumatera Utara. Data

berikut ini menyajikan waktu penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang diserahkan kepada BPK RI :

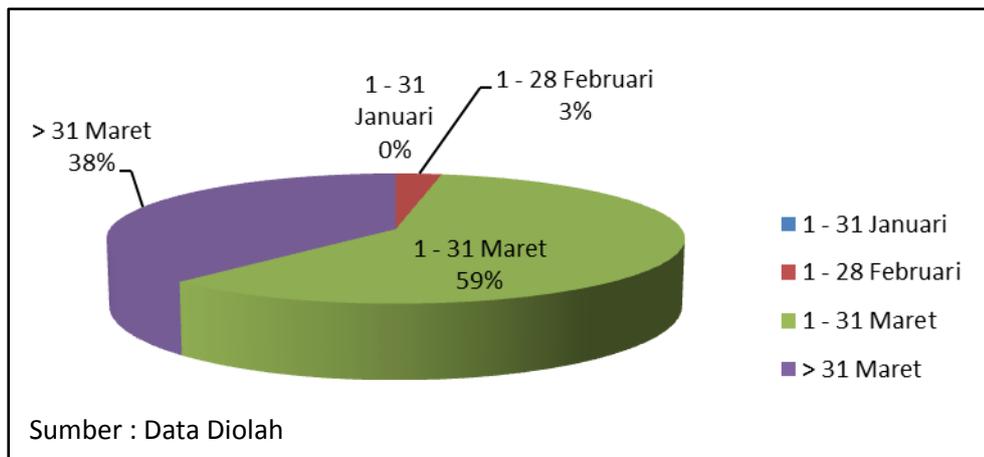
Tabel I-2. Penyampaian LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

No	Pemerintah Daerah	Waktu Penyampaian LKPD 2017
1	Provinsi Sumatera Utara	29 Maret 2018
2	Kabupaten Asahan	12 Maret 2018
3	Kabupaten Batubara	Di atas tanggal 31 Maret 2018
4	Kabupaten Dairi	29 Maret 2018
5	Kabupaten Deli Serdang	29 Maret 2018
6	Kabupaten Humbang Hansudutan	28 Maret 2018
7	Kabupaten Karo	Di atas tanggal 31 Maret 2018
8	Kabupaten Labuhan Batu	19 Maret 2018
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	29 Maret 2018
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	29 Maret 2018
11	Kabupaten Langkat	29 Maret 2018
12	Kabupaten Mandailing Natal	Di atas tanggal 31 Maret 2018
13	Kabupaten Nias	Di atas tanggal 31 Maret 2018
14	Kabupaten Nias Barat	Di atas tanggal 31 Maret 2018
15	Kabupaten Nias Selatan	Di atas tanggal 31 Maret 2018
16	Kabupaten Nias Utara	Di atas tanggal 31 Maret 2018
17	Kabupaten Padang Lawas	Di atas tanggal 31 Maret 2018
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	29 Maret 2018
19	Kabupaten Pakpak Bharat	29 Maret 2018
20	Kabupaten Samosir	28 Maret 2018
21	Kabupaten Serdang Bedagai	29 Maret 2018
22	Kabupaten Simalungun	29 Maret 2018
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	28 Maret 2018
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	Di atas tanggal 31 Maret 2018
25	Kabupaten Tapanuli Utara	29 Maret 2018
26	Kabupaten Toba Samosir	29 Maret 2018
27	Kota Binjai	28 Maret 2018
28	Kota Gunung Sitoli	Di atas tanggal 31 Maret 2018
29	Kota Medan	Di atas tanggal 31 Maret 2018
30	Kota Padangsidimpuan	29 Maret 2018
31	Kota Pematangsiantar	28 Februari 2018
32	Kota Sibolga	Di atas tanggal 31 Maret 2018
33	Kota Tanjung Balai	Di atas tanggal 31 Maret 2018
34	Kota Tebing Tinggi	28 Maret 2018

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 (www.bpk.go.id)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hanya 21 pemerintah daerah di Sumatera Utara yang menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sedangkan 14 pemerintah daerah masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Persentase waktu penyampaian LKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Gambar I-3.
Komposisi Waktu Penyampaian LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporannya dengan tepat waktu adalah sekitar 62%, dan selebihnya sebesar 38% belum menyampaikan laporannya secara tepat waktu.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah & Ridwan, 2012). Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara dalam pasal 16 disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c)

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester 1 2018 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I-3. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
	Jlh Permasalahan	Nilai (Rp. Juta)	Jlh Permasalahan	Nilai (Rp. Juta)	Jlh Permasalahan	Nilai (Rp. Juta)	Jlh Permasalahan	Nilai (Rp. Juta)
A. Kelemahan SPI	998	-	6.222	-	319	-	7.539	-
1. Kelemahan SPI	998	-	6.222	-	319	-	7.539	-
B. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1.233	4.855.825,83	6.558	2.544.963,84	239	2.668.184,48	8.030	10.068.974,15
1. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan :								
• Kerugian	603	505.518,47	2.903	1.540.604,52	51	299.608,83	3.557	2.345.731,82
• Potensi kerugian	53	566.840,94	426	317.869,22	34	145.025,34	513	1.029.735,50
• Kekurangan penerimaan	177	3.783.466,42	868	686.490,10	57	2.223.550,31	1.102	6.693.506,83
Subtotal berdampak finansial	833	4.855.825,83	4.197	2.544.963,84	142	2.668.184,48	5.172	10.068.974,15
2. Penyimpangan administrasi	400	-	2.361	-	97	-	2.858	-
C. Temuan ketidakhematan, tidakefisienan, dan tidakefektifan	87	267,21	-	-	117	1.490.520,41	204	1.490.787,62
1. Ketidakhematan	1	267,21	-	-	28	1.205.071,93	29	1.205.339,14
2. Tidakefisienan	-	-	-	-	5	237.263,25	5	237.263,25
3. Tidakefektifan	86	-	-	-	84	48.185,23	170	48.185,23
Total (A + B + C)	2.318	4.856.093,04	12.780	2.544.963,84	675	4.158.704,89	15.773	11.559.761,77
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		186.382,35		476.649,08		13.127,62		676.159,05

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 (www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan sebahagian besar ditemukan di pemerintah daerah. Dimana permasalahan atas kelemahan SPI sebanyak 6.222 (82,53%) dari total 7.539 permasalahan. Permasalahan atas ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.197 (81,15%) dari total 5.172 permasalahan, dan penyimpangan administrasi sebanyak 2.361

(82,61%) dari total 2.858 permasalahan. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara / daerah / perusahaan senilai 476.649,08 (18,73%).

. Dalam IHPS tersebut juga menyatakan bahwa masih terdapat 131 LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan / atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Berdasarkan hasil evaluasi BPK tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan dapat ditentukan oleh sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

Proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011). Menurut (Hall, 2004) mengungkap bahwa, *The quality of information generated by the accounting information sistem impacts management's ability to take actions and make decisions in connection with the organization's operations and to prepare reliable financial statements.* Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin bertambah dengan meningkatnya total jumlah anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya (Suarmika & Suputra, 2016). Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks harus

diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Efendi, Darwanis, & Abdullah, 2017).

Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Data dari Kementerian Keuangan, terdapat beragam jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel I-4. Daftar Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

No	Nama Aplikasi	Pembuat	Pengguna	%
1	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	BPKP	369	68%
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Kemendagri	92	17%
3	Sistem Informasi Anggaran dan Keuangan Daerah (SIMAKDA)	PT MSM	27	5%
4	E-Finance	PT STI	11	2%
5	SIMRAL	BPPT	5	1%
6	Sistem Lainnya	-	38	7%
Total			542	100%

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Dalam rangka mengatasi keragaman sistem informasi akuntansi pemerintah daerah, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data informasi keuangan daerah dalam format yang ditetapkan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Namun masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas data, untuk memastikan keandalan data yang dikirimkan sesuai dengan kinerja dan posisi keuangan pemerintah daerah serta ketepatan waktu penyampaian data laporan keuangan pemerintah daerah secara berkala (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Fenomena atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyangkut tentang kelemahan sistem informasi dan pelaporan masih sangat beragam. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi keuangan agar dapat berjalan dengan efektif sehingga pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berikut adalah daftar jumlah temuan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan yang meliputi tentang masalah proses penyusunan serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Tabel I-5. Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan Dengan Dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Kelemahan Sistem informasi dan pelaporan	2014	2015	2016	2017
Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat	985	978	813	800
Proses penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan	927	930	941	938
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai dan entitas terlambat menyampaikan laporan	53	65	51	41
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan	257	380	351	304
Jumlah	2.222	2.353	2.156	2.083

Sumber : : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK (www.bpk.go.id)

Menurut (Elvira Zeyn, 2012) *content* pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Ratifah & Ridwan, 2012).

Dalam rangka membangun efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi maka diperlukan sistem pengendalian internal (Sari, 2015). Mengingat

perkembangan kualitas laporan keuangan yang masih terlihat lambat, maka peningkatan kompetensi SDM dan peran pengawas keuangan serta efektivitas pengendalian intern pemerintah menjadi krusial. Sistem pengendalian intern akan sangat efektif bila pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi (Susanto, 2008). Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan (Syarifudin, 2014).

Terkait masalah tentang sistem pengendalian internal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pengawas intern memiliki peran baru yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan reviu laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Syarifudin, 2014).

Dengan demikian, tugas pengawas tidak hanya mengawasi pengelolaan keuangan tetapi melakukan sinergitas dengan pengelola keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan

kualitas laporan keuangan. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan (Mulyadi, 2008).

Fenomena lemahnya SPIP kerap terlihat pada IHPS yang disajikan oleh BPK. Berikut perkembangan hasil temuan tentang permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang disajikan dalam IHPS BPK-RI

Tabel I-6. Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan Dengan Kelemahan SPIP

Kelompok Permasalahan	2014	2015	2016	2017
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.222	2.353	2.156	2.083
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.598	2.450	2.657	2.887
Kelemahan struktur pengendalian intern	1.158	1.347	1.240	1.252
Jumlah	5.978	6.150	6.053	6.222

Sumber : : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK (www.bpk.go.id)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil IHPS pemeriksaan BPK pada tahun 2017 atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.252 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Menurut (Simanjuntak, 2012) bahwa SPIP itu vital sekali, kalau ingin memperbaiki sistem pengelolaan keuangan Pemda, maka perbaiki dulu pondasinya, yaitu dengan SPIP, dengan memperbaiki SPIP maka sistem informasi dapat lebih berkualitas.

Faktor lainnya yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem informasi keuangan daerah adalah anggaran. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Idris, 2013). Oleh sebab itu, dalam menghasilkan sistem informasi yang berkualitas juga tidak terlepas dari faktor ketersediaan anggaran. Faktor ketersediaan anggaran (*financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja (Idris, 2013). Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa adanya kepastian ketersediaan anggaran yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah (Ir. H. Dede Hermasah, 2008).

Ketersediaan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebahagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata porsi belanja pegawai dalam APBD 2015, baik provinsi maupun kabupaten/kota mencapai 40%. Porsi belanja pegawai di tingkat pemerintah kabupaten/kota tercatat rata-rata mencapai 46%. Di tingkat kabupaten/kota, lima pemda tertinggi dalam hal belanja pegawai adalah Kabupaten Langkat (76,3%), Kota Pematang Siantar (71,2%), Kabupaten Tanah Karo (68,4%), Kota Ambon (68,4%), dan Kota Kendari (68,3%). Hal ini mengakibatkan kualitas APBD di berbagai daerah di nilai masih rendah karena sebagian besar uang APBD masih dialokasikan untuk belanja pegawai negeri. Oleh karena itu Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mardiasmo (2017).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan subjek penelitian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian opini WDP dan TMP (Disclaimer) yang diberikan oleh BPK terhadap audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 59%.
2. Masih ditemukan beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan opini dari WTP ke WDP dan dari opini WDP ke TMP (Disclaimer).
3. Adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.
4. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah belum maksimal
5. Penyajian akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP sehingga mempengaruhi pemberian opini oleh BPK.
6. Adanya temuan BPK pada aspek sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja, dan struktur pengendalian intern
7. Ketersediaan anggaran yang sebahagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan menguji bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah ?.
2. Apakah ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah ?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah?.
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
5. Apakah ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
6. Apakah efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh kualitas laporan keuangan ?
7. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?.

8. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menguji :

- a. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
- b. Pengaruh ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
- c. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran secara bersama-sama terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
- d. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
- e. Pengaruh ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan.
- f. Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan ?
- g. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan ?.

- h. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah ?.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan hal-hal dimaksud sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas guna pencapaian *good governance*.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merujuk pada kemiripan peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015), namun ada beberapa perbedaan yang terdapat dengan penelitian tersebut. Perbedaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini dengan penelitian yang terkait sebelumnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1-7. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan
1	Eka Nurmalia Sari (2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota se – Sumatera Utara	metode <i>expalanatory research</i> dan analisis deskriptif dengan statistic SEM-PLS	Sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, kompetensi dan komitmen organisasional berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi, dan kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Waktu penelitian dan variabel penelitian
2	Desy Sefri Yensi, Dr. H. Amir Hasan Ms, MM.,Ak.,CPA,CA C,CA, Yuneita Anisma,SE, M.Si.,Ak.,CA	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)	analisis regresi berganda	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel wilayah pengendalian internal (audit internal) tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah	Lokasi, waktu penelitian dan variabel penelitian

Lanjutan Tabel 1-7. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan
3	Aristanti Widyaningsih, Alvian Triantoro, Lili Sugeng Wiyantoro (2011)	Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat)	Analisis jalur (<i>Path Analysis</i>)	Efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal dan adanya hubungan moderat antara efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dengan kualitas informasi laporan keuangan, Sistem akuntansi keuangan regional memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan, juga pengaruh yang signifikan dan tidak langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem kontrol internal.	Lokasi, waktu penelitian dan variabel penelitian
4	Nurlis, Winwin Yadiati (2017)	<i>The Influence of Internal Control Effectiveness, Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City)</i>	<i>Smart PLS</i>	Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan efektivitas pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh.	Lokasi, waktu penelitian dan variabel penelitian
5	Desiana Anugrah, Budiawan, Budi S Purnomo (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)	Metode deskriptif verifikasi Teknik analisis data analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Lokasi, waktu penelitian dan variabel penelitian

Berdasarkan penelitian yang terkait, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang di ajukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang mendasar adalah lokasi, waktu penelitian dan variabel penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah sebagai sebuah entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik yang disajikan dalam suatu bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (P. R. Indonesia, 2010), pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Wood dan Honner (Horner, 2010) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sebagai laporan yang menyajikan secara wajar keadaan entitas dan aktivitas untuk akhir tahun dan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang berkualitas di organisasi pemerintahan menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009) adalah laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*). Agar dapat dikategorikan sebagai laporan keuangan yang berkualitas, maka dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami (P. R. Indonesia, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, dapat didefinisikan kualitas laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi kondisi keuangan sebuah entitas (organisasi) yang disajikan pada akhir periode akuntansi dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan dalam standar.

b. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Herawati, 2014). Menurut (Bodnar, George H., 2010), karakteristik dan informasi yang berkualitas meliputi hal-hal berikut :

- 1) *Relevance* (relevan). Informasi dapat dikatakan relevan jika keberadaannya dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, atau mengonfirmasi, atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

- 2) *Reliable* (andal), informasi dikatakan terpercaya (andal) jika keberadaannya bebas dari kesalahan dan bias, serta secara akurat menjelaskan atas aktivitas organisasi/entitas.
- 3) *Complete* (lengkap), informasi dikatakan sempurna atau utuh (lengkap) bila keberadaannya tidak meninggalkan aspek-aspek penting yang melatarbelakangi suatu kejadian atau aktivitas yang diukur.
- 4) *Timely* (tepat waktu), informasi dapat dikatakan tepat waktu bila keberadaannya tersedia tepat pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan.
- 5) *Understanable* (dapat diverifikasi), informasi dikatakan dapat dipahami bila disajikan dalam format yang berguna dan dapat dimengerti.
- 6) *Verifiable* (dapat diverifikasi), informasi dikatakan dapat diuji bila dua orang yang berpengetahuan secara independen memeriksa, akan menghasilkan informasi yang sama.

Menurut (Van Beest, Braam, & Boelens, 2009) ; *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* dalam (Sari, 2015) bahwa kualitas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan :

- 1) ***Relevance***, *Relevance is referred to as the capability “of making a difference in the decisions made by users in their capacity as capital providers. Relevance is operationalized using four items referring to predictive and confirmatory value.*

- 2) **Faithful representation**, *Faithful representation is the second fundamental qualitative characteristic as elaborated in the Conceptual Framework for Financial Reporting. To faithfully represent economic phenomena that information purports to represent, annual reports must be complete, neutral, and free from material error. Faithful representation is measured using five items referring to neutrality, completeness, freedom from material error, and verifiability.*
- 3) **Understandability**, *The first enhancing qualitative characteristic, understandability, will increase when information is classified, characterized, and presented clearly and concisely. Understandability is referred to, when the quality of information enables users to comprehend their meaning. Understandability is measured using five items that emphasize the transparency and clearness of the information presented in annual reports*
- 4) **Comparability**, *A second enhancing qualitative characteristic is comparability, which “is the quality of information that enables users to identify similarities in and differences between two sets of economic phenomena. Comparability is measured using six items that focus on consistency. Four items refer to the consistency in use of the same accounting policies and procedures from period to period within a company. Two items are used to measure the comparability in a single period across companies.*
- 5) **Timeliness**, *the final enhancing qualitative characteristic defined in the Conceptual Framework for Financial Reporting is timeliness. “Timeliness means having information available to decision makers before it loses its capacity to influence decisions”. Timeliness refers to the time it takes to reveal the information and is related to decision usefulness in general.*

Selanjutnya (Prof. Erlina, Omar Sakti Rambe, 2015) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas yang terdiri dari : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut :

1) **Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu (*Timeliness*). Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap (*Completeness*). Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) **Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
- c) Netralitas : Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perubahan penerapan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Hal ini berarti bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan memungkinkan para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari dua set fenomena ekonomi yang ada.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas laporan keuangan dapat pula dilihat dari sudut pandang auditor yang memberikan opini tentang penyajian laporan keuangan suatu organisasi (Sari, 2015). Menurut (Kaimenakis, Cohen Sandra, 2011) dalam (Sari, 2015), laporan audit dapat berfungsi sebagai proksi dari kualitas laporan akuntansi dan oleh karena itu memberikan legitimasi untuk suatu entitas yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Selanjutnya (Kaimenakis, Cohen Sandra, 2011) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak hanya harus sesuai dengan

standar akuntansi tetapi pada saat yang sama laporan keuangan harus disertai dengan laporan auditor eksternal mengenai komentar terhadap kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan sangat penting agar laporan keuangan lebih informatif. Laporan audit dilampirkan pada laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang berguna dan berhubungan dengan kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi (Sari, 2015).

Opini auditor dalam memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2010) terdiri dari :

- 1) *Unqualified Opinion* (Pendapat wajar tanpa pengecualian)
- 2) *Unqualified Opinion Report with Explanatory Research* (Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan)
- 3) *Qualified Opinion* (Pendapat wajar dengan pengecualian)
- 4) *Adverse Opinion* (Pendapat tidak wajar)
- 5) *Disclaimer of Opinion* (Tidak memberikan pendapat)

Pemberian opini kepada laporan keuangan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

- 1) **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).**
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan

keputusan. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa apabila :

- a. Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan ; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif.
 - b. Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa.
 - c. Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.
- 2) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
 Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Sebagian pemeriksa memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- 3) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
 Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisas menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan
- 4) Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)
 Adalah pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengukur kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada (P. R.

Indonesia, 2010; Kaimenakis, Cohen Sandra, 2011; Sari, 2015; Van Beest et al., 2009), yaitu sebagai berikut :

- 1) *Relevance* (relevan), informasi yang ada di dalam laporan keuangan mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau megoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 2) *Reliability* (andal), informasi yang ada disajikan secara jujur (*faithful representation*), lengkap (*completeness*), netral (*neutrality*), bebas dari kesalahan (*free from error*), akurat (*accurate*), dan dapat diuji (*verifiability*).
- 3) *Timelines* (tepat waktu), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersedia tepat pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Dimensi ini diukur dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke auditor.

2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

a. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pada sistem informasi akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri penting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya sistem informasi akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sebuah negara (Sari, 2015). Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan

untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Iman Bastari (Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, 2004).

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah dikenal dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD yang dilaksanakan pada pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 (P. R. Indonesia, 2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang menyatakan bahwa SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Berdasarkan PP tersebut, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan guna pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Riawan, 2016).

Tujuan penyelenggaraan SIKD diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional. Selanjutnya dalam PP 71 Tahun 2010 menyatakan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah.

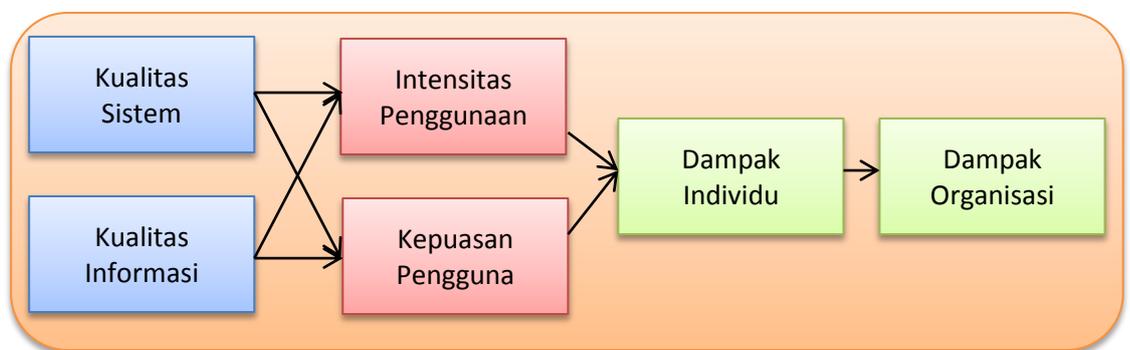
b. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan bagian dari kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah itu sendiri. Istilah efektivitas sistem informasi ditunjukkan oleh ukuran kesuksesan penerapan sistem informasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (William H. DeLone and Ephraime R. McLean, 2003). Menurut (Ismail, 2009) efektivitas sistem informasi akuntansi berkenaan dengan *systems quality, information quality, information use, user satisfaction, individual impact, and organizational impact*. Adapun istilah kesuksesan atau keberhasilan sistem informasi akuntansi ditunjukkan oleh ukuran output yang dihasilkan oleh sistem yang sesungguhnya, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja dan meningkatkan

kontrol atas keputusan yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut (Sari, 2015).

Secara teori ada beberapa model komprehensif yang dapat dirujuk untuk dimensi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, antara lain *Updated Information System Success Model* (William H. DeLone and Ephraime R. McLean, 2003), *Hierarchical Structural Model* (Farhoomand, 1998) dan (Edition & Traver, 2012) memberikan lima dimensi untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Dimensi-dimensi tersebut adalah tingkat penggunaan yang tinggi, kepuasan pengguna terhadap sistem, sikap yang positif pengguna terhadap sistem tersebut, tercapainya tujuan sistem informasi dan imbal balik keuangan.

Kerangka pikir teoritis DeLone *and* McLean (DeLone, 1992) atas efektivitas sebuah sistem informasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar II-1. Model DeLone *and* McLean

Dimensi efektivitas sistem informasi pada model DeLone *and* McLean ditentukan oleh dimensi sebagai berikut :

- 1) Dimensi kualitas sistem (*system quality*), berhubungan dengan proses pengukuran sistem itu sendiri yaitu mengukur efektivitas sistem informasi secara teknis. Kualitas sistem menunjukkan kualitas produk

dari aplikasi sistem informasi. Untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari : andal, fleksibel, terintegrasi dan pentingnya sistem.

- 2) Dimensi kualitas informasi (*information quality*) yaitu mengukur efektivitas informasi dalam menyampaikan makna yang dimaksud. Indikator yang digunakan adalah akurat, tepat waktu, komplit dan relevan.
- 3) Dimensi penggunaan sistem, berkaitan dengan semakin baik kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan, misalnya dengan cepatnya waktu untuk mengakses, dan kegunaan dari output sistem, akan menyebabkan pengguna tidak merasa enggan untuk melakukan penggunaan kembali (*reuse*), dengan demikian intensitas penggunaan sistem akan meningkat. Penggunaan yang berulang-ulang ini dapat dimaknai bahwa penggunaan yang dilakukan bermanfaat bagi pengguna. Tingginya derajat manfaat yang diperoleh mengakibatkan pengguna akan lebih puas. Dimensi ini diukur dengan menggunakan istilah *frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency*.
- 4) Dimensi kepuasan pemakai (*user satisfaction*) yang merupakan respon pengguna terhadap sistem yang diukur dengan menggunakan istilah *self-efficacy, repeat visit, personalization, perceived risk and enjoyment*.
- 5) Dimensi dampak individu (*individual impact*), mengukur pengaruh sistem terhadap kebiasaan pengguna. Dampak individu merupakan pengaruh dari keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kinerja, pengambilan keputusan, dan derajat pembelajaran individu

dalam organisasi. Penerapan sistem informasi berdampak pada reaksi yang ditunjukkan oleh perilaku individu dalam organisasi. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Sistem dikatakan efektif jika pengguna sistem mendapatkan manfaat seperti produktivitas kinerja individu tersebut.

- 6) Dimensi dampak organisasi (*organizational impact*), yaitu mengukur dampak sistem terhadap organisasi, apakah sistem memberi dampak terhadap kinerja perusahaan seperti : *cost saving expanded markets, incremental additional sales, reduced search cost, time saving*, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dimensi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi kualitas sistem, berhubungan dengan proses pengukuran sistem itu sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari keandalan, fleksibel, terintegrasi, dan pentingnya sistem itu sendiri.
- 2) Dimensi kualitas informasi, berhubungan dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dimensi ini diukur dengan menggunakan indikator akurat, tepat waktu, komplit dan relevan.
- 3) Dimensi penggunaan sistem berhubungan dengan keunggulan sistem atas kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan yang berkaitan dengan tingkat kemanfaatan yang diperoleh seorang

pengguna atas sistem informasi akuntansi.. Dimensi ini diukur dengan menggunakan kualitas pelayanan sistem, kemudahan sistem, kesesuaian sistem.

- 4) Dimensi kepuasan pemakai (*user satisfaction*) yang merupakan respon pengguna terhadap sistem. Dimensi ini diukur dengan menggunakan indikator keyakinan diri (*self-efficacy*), kunjungan berulang (*repeat visit*), personalisasi (*personalization*), *perceived risk and enjoyment*.
- 5) Dimensi dampak organisasi, merupakan pengaruh keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja organisasi. Variabel dampak organisasi diukur dengan efektivitas informasi dan efisiensi biaya atas sistem itu sendiri yang berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi bahwa sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan sangat diperlukan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi

pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif

Dijelaskan oleh (Mahmudi, 2010) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem

pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (P. R. Indonesia, 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilai risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern. Penjelasan dari komponen-komponen sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup sebagai berikut :

- a) Integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- d) Struktur organisasi
- e) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- g) Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko mencakup sebagai berikut :

- a) Pengidentifikasian risiko
- b) Analisis risiko
- c) Pengelolaan risiko

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya kegiatan pengendalian yang mungkin relevan

dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan perihal berikut :

- a) Review terhadap kinerja
 - b) Pengolahan informasi
 - c) Pengendalian fisik
 - d) Pemisahan tugas
 - e) Pencatatan dan dokumentasi
- 4) Informasi dan komunikasi
- Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang yang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan harus diperoleh untuk memahami :
- a) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
 - b) Bagaimana transaksi tersebut dimulai
 - c) Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
 - d) Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke data laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.
- 5) Pemantauan pengendalian intern.
- Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Aktivitas pemantau auditor intern atau personel yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perhatian.

Berdasarkan uraian di atas maka komponen sistem pengendalian internal pemerintah dalam konteks penelitian ini mengacu pada komponen-komponen yang telah diuraikan di atas yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan (P. R. Indonesia, 2008)

4. Ketersediaan Anggaran

a. Pengertian Ketersediaan Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Anthony, N. Robert dan Govindarajan, 2011). Menurut (Kaho, 2010) salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Sumber Daya Manusia dan Kemampuan aparatur adalah keuangan yang stabil dan peralatan yang lengkap.

Governmental Accounting Standard Board menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya (Supriyono, 1987) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian.

Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang dimiliki

organisasi meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, n.d.). Dengan demikian, setiap organisasi perlu proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran karena proses tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya harus efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya (Mardiasmo, n.d.) menyatakan bahwa anggaran harus:

- 1) anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- 2) harus adanya kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya, yang berarti alokasi APBD harus jelas dan menggambarkan dukungan alokasi anggaran bagi daerah guna mengemban misinya dari tahun ke tahun menuju tujuan strategis daerah.
- 3) desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dan kejelasan para pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan mekanisme *check and balance*.
- 4) kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas
- 5) kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, dan PNS daerah baik rasio dan dasar pertimbangannya
- 6) kejelasan tentang bentuk dan struktur anggaran kinerja dan anggaran multi tahun yang diharapkan lebih mendorong keterbukaan dan kecepatan penyajian laporan keuangan daerah
- 7) prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional, karena dalam realisasi APBD sering mengakibatkan penambahan keuangan daerah,
- 8) standard dan sistem akuntan keuangan daerah, laporan keuangan daerah, diperlukan peranan akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dapat mendorong percepatan internalisasi akuntansi dalam anggaran
- 9) aspek pembinaan dan pengawasan guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah, dan

- 10) pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Semua aspek di atas, tidak dilaksanakan secara parsial, namun terpadu bila ingin mewujudkan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran memiliki beberapa fungsi: 1) Alat perencanaan, anggaran berfungsi merencanakan sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya anggaran diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan keberlangsungan organisasi. Anggaran harus mencerminkan prioritas rencana kerja yang akan dilakukan pemerintah. 2) Alat koordinasi, anggaran berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 3) Alat evaluasi, anggaran yang telah disusun dijadikan sebagai tolok ukur dalam pencapaian target anggaran, efisiensi pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan rencana. 4) Alat motivasi, anggaran sebagai acuan agar pengelolaannya dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pada instansi pemerintah, jumlah anggaran yang diperuntukkan dalam satu periode, instansi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang efisien (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor ketersediaan anggaran (*financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.

b. Indikator Ketersediaan Anggaran Pada Pemerintah Daerah

Penelitian tentang ketersediaan anggaran belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian tentang ketersediaan anggaran dalam (Idris, 2013) mengemukakan bahwa ketersediaan anggaran dalam pelayanan, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur. Oleh karena itu seluruh dimensi ketersediaan anggaran yang ada, harus terus menerus ditingkatkan lagi. Adapun indikator dan dimensi ketersediaan anggaran menurut (Idris, 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Dimensi sumber anggaran, dengan indikator : APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten
- 2) Dimensi alokasi anggaran, dengan indikator : alokasi perencanaan, alokasi sosialisasi, alokasi pelaksanaan, dan alokasi pengendalian
- 3) Dimensi kemampuan pengelolaan anggaran, dengan indikator : tujuan program yang jelas, standar prosedur yang jelas, indikator kinerja, berdasarkan perkiraan dan proyeksi, terdapat control dan evaluasi, terdapat transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan uraian di atas maka dimensi ketersediaan anggaran pada penelitian ini terdiri dari : dimensi sumber anggaran dengan indikator APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dimensi alokasi anggaran dengan indikator alokasi perencanaan, alokasi sosialisasi, alokasi pelaksanaan, dan alokasi pengendalian, dimensi kemampuan pengelolaan anggaran dengan indikator tujuan program yang jelas, standar prosedur yang jelas, indikator kinerja.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Jenis Teori/penelitian/fenomena	Kesimpulan/pernyataan pakar/pernyataan teori
1	Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar (Yuliani, 2010)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)	Independen : Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh
2	Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (Basukianto, 2015)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan	Independen : Teknologi Informasi, Peran PPK SKPD, Rekonsiliasi, Sistem Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan SKPD	1. TIF berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 2. PPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 3. RKN berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 4. SPI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK
3	I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (Upabayu, Mahaputra, & Putra, 2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen : Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dependen : Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Lanjutan Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Jenis Teori/penelitian/fenomena	Kesimpulan/ pernyataan pakar/ pernyataan teori
4	Aristanti Widyarningsih, Alvian Triantoro, Lili Sugeng Wiyantoro (Widyarningsih, Indonesia, Triantoro, Indonesia, & Wiyantoro, 2011)	Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat)	Independen : Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Akuntabilitas Keuangan Intervening : Kualitas Informasi Laporan Keuangan	1. Efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal 2. adanya hubungan moderat antara efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dengan kualitas informasi laporan keuangan 3. Sistem akuntansi keuangan regional memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan, juga pengaruh yang signifikan dan tidak langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem kontrol internal.
5	Eka Nurmala Sari (Sari, 2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota se – Sumatera Utara	Independen : Sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, komitmen organisasi Dependen : Penerapan SIA, kualitas laporan keuangan	1. Sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, kompetensi dan komitmen organisasional berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi 2. Kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
6	Silviana (Silviana, 2013)	Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di Provinsi Jawa Barat	Independen : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan SIA berhubungan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan jawaban responden dari entitas yang diteliti, variabel penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas LKPD.

Lanjutan Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Jenis Teori/penelitian/fenomena	Kesimpulan/ Pernyataan pakar/ Pernyataan teori
7	Tuti Herawati (Herawati, 2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Independen : Sistem Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan 2. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
8	Rukmi Juwita (Juwita, 2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Independen : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Dadang Suwanda (Suwanda, 2015)	<i>Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)</i>	Independen : <i>Governmental Accounting Standards, Human Resources, Implementation of Internal Control System, Organizational Commitment, and Utilization of Information Technology</i> Dependen : <i>Quality of Local Government Dependence Finance Report</i>	<i>The results simultaneously showed Application Government Accounting Standards (SAP) (X1), Quality of Human Resources (HR) (X2), Implementation of Internal Control Sistem (SPI) (X3), Organizational Commitment (X4) and Utilization of Information Technology (X5) has a positive influence on the quality of local government financial reports</i>

Lanjutan Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Jenis Teori/penelitian/fenomena	Kesimpulan/ Pernyataan pakar/ pernyataan teori
10	Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (Nuryanto & Afiah, 2013)	<i>The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)</i>	Independen : <i>Technology Utilization and Internal Control</i> Dependen : <i>Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)</i>	<i>Simultaneously, there are positive and significant influences of competence apparatus, information technology utilization and internal controls on financial reporting quality Partially, there is a positive and significant influence of apparatus competence on the quality of financial statements Partially, there is a positive and significant influence of information technology utilization on quality of financial statements Partially, there is a positive but not significant effect of the internal control on the quality of financial reporting</i>

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan dan terkait, serta merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pengendalian diperlukan di dalam sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai suatu tujuan (Susanto, 2008). Sistem informasi akuntansi dengan pengendalian internal harus berjalan beriringan dalam suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi yang berlaku berisi berbagai metode

dan prosedur harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian intern (Huda, Ekawati, & Pratiwi, 2017). Sistem informasi akuntansi dapat diterapkan dengan efektif jika di dalam sistem tersebut juga dibangun sistem pengendalian internal. Menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2010) menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk mengembangkan pengendalian internal dengan tujuan untuk memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu : 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2010; P. R. Indonesia, 2008).

Kelima komponen ini terbangun dalam insfrastruktur sistem informasi akuntansi yang disebut dengan sistem informasi keuangan daerah sehingga tujuan dari sistem informasi tersebut dapat tercapai. Sistem pengendalian intern akan sangat efektif bila pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting dari organisasi (Susanto, 2008). Untuk pengembangan sebuah sistem informasi diperlukan pengendalian internal, karena tanpa pengendalian internal yang tepat akan dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan sistem informasi (Bae, Epps, & Gwathmey, 2003).

Beberapa penelitian terkait menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Dalam penelitian (Huda et al., 2017) pada Perusahaan BUMN di Kota Palembang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengendalian internal. Ketersediaan sistem informasi akuntansi yang baik akan membantu manajemen mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Penelitian yang

sama pada BUMN yang berada di Jawa Barat (Kurniawan, 2017) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi, betapa pentingnya pengendalian internal untuk menghasilkan sistem informasi akuntansi yang berkualitas sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas pula. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah daerah, (Sari, 2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi.

2. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Anggaran merupakan rencana keuangan masa mendatang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Anggaran organisasi publik mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah (Ayuni & Erawati, 2018).

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran juga berimplikasi pada aparatur pemerintah untuk menyusun sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah, sehingga aparatur pemerintah memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara cepat (Ayuni & Erawati, 2018). Untuk membangun sebuah sistem informasi keuangan tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Tetapi pengalokasian penganggaran belanja pada pemerintah daerah yang terjadi saat ini lebih

dominan kepada belanja pegawai. Sumber-sumber penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah bersifat terbatas, sehingga dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk hasil yang optimal.

Penelitian tentang pengaruh ketersediaan anggaran terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah belum banyak dilakukan . Adapun penelitian yang terkait dengan ketersediaan anggaran dilakukan oleh (Idris, 2013), pada SKPD di Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung variabel ketersediaan anggaran dan jiwa kewirausahaan terhadap kinerja pelayanan aparatur.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran (Rai, 2010). Semua elemen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan memiliki kontribusi terhadap keandalan laporan keuangan (Nugraha, 2010). Tujuan keseluruhan dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan secara material (Brink, 2011). Lebih lanjut (Brink, 2011) menyatakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka dengan memperkuat lingkungan pengendalian internal mereka melalui program etika formal termasuk kode etik.

Menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2010), salah satu dari tujuan pengendalian internal adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (Herawati, 2014).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan dilakukan oleh (Nugraha, 2010) pada OPD di daerah Bandung. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian (Lia, 2009) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Pengawasan Intern pada Dinas Kota Tasikmalaya Pengawasan Intern yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan telah dilakukan dengan baik pada Dinas Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain Dinas Kota Tasikmalaya telah melakukan Pengawasan Intern dengan baik. Penelitian yang dilakukan (Nurilah, 2014) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi dikarenakan masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

4. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Anggaran pada pemerintah daerah adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan- kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Idris, 2013).

Anggaran diharapkan dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah dibuat secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengendalian dari tingkat atas sampai tingkat bawah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat (Nurhayati, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Riawan, 2016) pada semua SKPD di Kabupaten Buton Utara menyatakan bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pentingnya kualitas anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton Utara baik berupa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan

evaluasi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Faktor terpenting dan paling menentukan adalah evaluasi anggaran yang ditunjukkan dengan loading faktor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan secara optimal akan menghindari terjadi penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya (Jayamaha, 2014) menunjukkan bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi kualitas anggaran (perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran) maka akan tercapai kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memaksimalkan kualitas anggaran melalui perencanaan anggaran yang optimal di setiap OPD dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan menghindari terjadi penyimpangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

5. Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem informasi keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Suatu organisasi harus mengembangkan sistem informasi untuk memastikan kejadian-kejadian ekonomi dari entitas telah dicatat tepat waktu dan wajar dalam rangka menyiapkan informasi yang berkualitas (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2010). Hal yang sama dikemukakan oleh (Rick Hayes, Roger

Dassen, 2005) bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang handal.

Selanjutnya (Hall, 2004) menyatakan bahwa secara fundamental, tujuan sistem informasi akuntansi adalah (1) menyediakan informasi tentang sumber daya organisasi yang digunakan, (2) menyajikan informasi yang berhubungan dengan pembuatan keputusan manajemen, dan (3) menyediakan informasi untuk personel-personel operasi guna membantu personel-personel tersebut melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan variabel ini oleh (H. Sajady, Ph.D. ; M. Dastgir, Ph.D ; H. Hashem Nejad, 2008) meneliti tentang penilaian efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan dapat menyebabkan perbaikan pada kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses transaksi perusahaan. Penelitian selanjutnya oleh (Yuliani, 2010) pada Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa setiap dilakukan peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

6. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

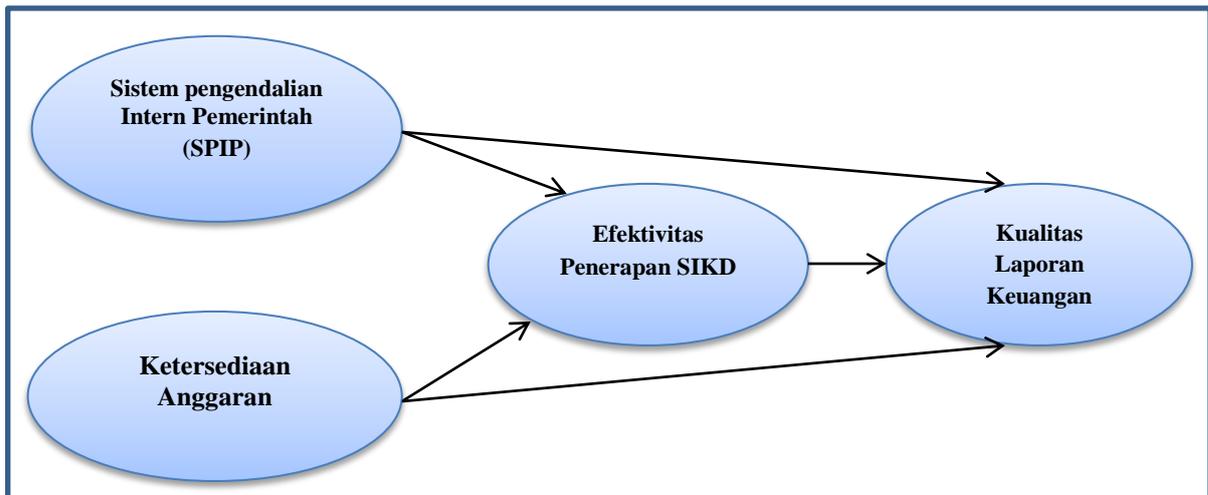
Sistem pengendalian internal pemerintah dalam organisasi sektor publik adalah alat untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang tidak perlu dilakukan dalam segala aspek dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien. (Rusvianto, Mulyani, & Yuliafitri, n.d.) Anggaran diharapkan dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah dibuat secara efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat (Nurhayati, 2013).

Sistem akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 11 adalah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dari sisi eksternal, laporan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan salah satu alat untuk penilaian kinerja unit. Sementara itu, dari sisi internal, laporan merupakan dasar untuk mengambil keputusan. Untuk mendapatkan nilai informasi yang baik dan berkualitas dalam laporan keuangan tidak hanya diperlukan sistem pengendalian internal yang harus berjalan dengan baik dalam pemerintahan itu sendiri tetapi harus didukung dengan sistem akuntansi yang baik. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi

berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2010). Sistem informasi keuangan yang diterapkan secara efektif diharapkan akan mampu digunakan sebagai alat untuk proses pengelolaan anggaran dimulai dari penganggaran, penatausahaan sampai kepada pelaporan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2013) menyatakan bahwa anggaran dan pengendalian berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas kinerja SKPD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Martina, 2012) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sistem pengendalian intern memiliki hubungan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin besar sistem pengendalian intern maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin besar pula. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Dari berbagai uraian di atas, keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat melalui kerangka konseptual seperti yang ditampilkan berikut ini :



Gambar II.1.
Hubungan Antar Variabel dalam Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
2. Ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh kualitas laporan keuangan.

7. Sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel berupa angka-angka yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 1 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada Desember 2018 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Maret 2019 untuk penyelesaian dan pengesahan tesis.

Tabel III-1. Rencana Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu			
		Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul	■			
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	
3	Seminar Proposal			■	
4	Pengumpulan Data			■	■
5	Pengolahan Data				■
6	Penulisan Laporan				■
7	Seminar Hasil				■
8	Penyelesaian Laporan				■
9	Sidang Tesis				■

Sumber : Data diolah

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif (Sugiyono, 2005). Jenis teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasinya relatif kecil, yaitu sebanyak 34 pemerintah daerah, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel.

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini terdiri atas dua model, pada model pertama yang menjadi variabel endogen adalah efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1), dengan variabel eksogen terdiri atas sistem pengendalian intern pemerintah (x_1) dan ketersediaan anggaran (x_2).

Sedangkan pada model yang kedua, yang menjadi variabel endogen adalah kualitas laporan keuangan (y_2), dengan variabel endogen terdiri atas sistem pengendalian intern pemerintah (x_1) dan ketersediaan anggaran (x_2) dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1).

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (x₁)

Dimensi dan indikator dari masing-masing dimensi sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian, indikator yang digunakan meliputi : (1) integritas dan nilai etika ; (2) komitmen terhadap kompetensi ; (3) filosofi dan gaya operasi manajemen ; (4) struktur organisasi ; (5) pemberian wewenang dan tanggung jawab ; (6) kebijakan dan praktik sumber daya manusia ; (7) Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif ; (8) hubungan kerja yang baik dengan pemerintah terkait.
- b. Penilaian resiko, indikator yang digunakan meliputi : (1) identifikasi risiko, (2) analisis risiko dan (3) pengelolaan risiko.
- c. Pengendalian aktivitas, indikator yang digunakan meliputi : (1) review terhadap kinerja, (2) pengolahan informasi ; (3) pengendalian fisik ; (4) pemisahan tugas ; dan (5) pencatatan dan dokumentasi.
- d. Sistem informasi dan komunikasi, indikator yang digunakan meliputi : (1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ; (2) mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- e. Pemantauan, indikator yang digunakan meliputi : (1) pemantauan berkelanjutan ; (2) evaluasi terpisah ; (3) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Masing-masing dimensi di atas diukur melalui indikator dengan menggunakan skala interval dimana semua item pertanyaan diukur pada skala 1 sampai 5.

2. Ketersediaan Anggaran (x_2)

Dimensi ketersediaan anggaran mengacu kepada (Idris, 2013) terdiri atas sumber anggaran, alokasi anggaran dan kemampuan pengelolaan anggaran, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Sumber anggaran, dengan indikator : APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/kabupaten
- b. Alokasi anggaran, dengan indikatornya : alokasi perencanaan, alokasi sosialisasi, alokasi pelaksanaan, dan alokasi pengendalian
- c. Kemampuan dalam pengelolaan anggaran, dengan indikator; tujuan program yang jelas, standar prosedur yang jelas, indikator kinerja.

Masing-masing dimensi di atas diukur melalui indikator dengan menggunakan skala interval dimana semua item pertanyaan diukur pada skala 1 sampai 5.

3. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (y_1)

Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah diukur dengan mengacu pada (William H. DeLone and Ephraime R. McLean, 2003) dengan menggunakan dimensi dan indikator sebagai berikut :

- a. Dimensi kualitas sistem, berhubungan dengan proses pengukuran sistem itu sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari keandalan, fleksibel, terintegrasi, dan pentingnya sistem itu sendiri.

- b. Dimensi kualitas informasi, berhubungan dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dimensi ini diukur dengan menggunakan indikator akurat, tepat waktu, komplit dan relevan.
- c. Dimensi penggunaan sistem berhubungan dengan keunggulan sistem atas kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan yang berkaitan dengan tingkat kemanfaatan yang diperoleh seorang pengguna atas sistem informasi akuntansi.. Dimensi ini diukur dengan menggunakan kualitas pelayanan sistem, kemudahan sistem, kesesuaian sistem.
- d. Dimensi kepuasan pemakai (*user satisfaction*) yang merupakan respon pengguna terhadap sistem. Indikator untuk mengukur dimensi ini melalui keyakinan diri menggunakan sistem, sistem sering digunakan / kunjungan berulang, sistem sesuai kebutuhan, risiko yang diterima dan senang menggunakan sistem.
- e. Dimensi dampak organisasi, merupakan pengaruh keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja organisasi. Dimensi ini diukur dengan efektivitas informasi dan efisiensi biaya atas sistem itu sendiri yang berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi sehingga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat.

Masing-masing dimensi di atas diukur melalui indikator dengan menggunakan skala interval dimana semua item pertanyaan diukur pada skala 1 sampai 5.

4. Kualitas Laporan Keuangan (y₂)

Dimensi dari kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

- a. Relevan (*relevance*), informasi yang ada dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa yang akan datang, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Andal (*reliability*), informasi yang disajikan secara jujur, lengkap, netral, bebas dari kesalahan, akurat dan dapat di uji.
- c. Tepat waktu (*timelines*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersedia tepat pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan.

Masing-masing dimensi di atas diukur melalui indikator dengan menggunakan skala interval dimana semua item pertanyaan diukur pada skala 1 sampai 5.

Berdasarkan uraian dari masing-masing variabel di atas, maka defenisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat melalui tabel III-2. berikut :

Tabel III-2. Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Sistem pengendalian Intern Pemerintah (x_1) (P. R. Indonesia, 2008)	Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas dan nilai etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Filosofi dan gaya operasi manajemen 4. Struktur Organisasi 5. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 7. Peran aparat pengawasan yang efektif 8. Hubungan kerja yang baik dengan pemerintah terkait 	Interval
	Penilaian risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi risiko 2. Analisis risiko 3. Pengelolaan risiko 	Interval
	Pengendalian Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review terhadap kinerja 2. Pengolahan informasi 3. Pengendalian fisik 4. Pemisahan tugas 5. Pencatatan dan dokumentasi 	Interval
	Sistem informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi 2. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui informasi secara terus menerus 	Interval
	Pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya 	Interval
Ketersediaan Anggaran (x_2) (Idris, 2013)	Sumber Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran APBN 2. Penganggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota 	Interval
	Alokasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Perencanaan 2. Alokasi Sosialisasi 3. Alokasi Pelaksanaan 4. Alokasi pengendalian 	Interval
	Kemampuan dalam pengelolaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. tujuan program yang jelas. 2. standar prosedur yang jelas 3. indikator kinerja 	Interval

Lanjutan Tabel III-2. Defenisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (y_1) (William H. DeLone and Ephraime R. McLean, 2003)	Kualitas sistem	1. Keandalan sistem 2. Sistem yang fleksibel 3. Sistem yang terintegrasi 4. Pentingnya sistem	Interval
	Kualitas informasi	1. Akurat 2. Tepat waktu 3. Komplit dan relevan	Interval
	Penggunaan Sistem	1. Pelayanan sistem 2. Kemudahan sistem 3. Kesesuaian sistem	Interval
	Kepuasan Pemakai	1. Keyakinan diri menggunakan sistem 2. Sistem sering digunakan / kunjungan berulang 3. Risiko yang diterima 4. Senang menggunakan sistem	Interval
	Dampak Organisasi	1. Efektivitas informasi 2. Efisiensi biaya	Interval
Kualitas Laporan Keuangan (y_2)	Relevan Andal Tepat Waktu	1. Opini BPK 2. Kesesuaian dengan SAP 3. Penyajian fakta secara jujur 4. Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Interval

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, yakni data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan terstruktur mengenai hal yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Inspektorat Daerah di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang dihimpun oleh suatu lembaga tertentu yang dipublikasikan umum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari BPK RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara yang meliputi opini yang diberikan auditor atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan data penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang diserahkan kepada BPK RI.

Selanjutnya data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Skala yang dipakai untuk menjawab kuesioner adalah skala likert. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut :

Tabel III-3 Bobot Skala Likert

Kategori Jawaban Pertanyaan/Pernyataan	Skala Likert
Tidak Memadai / Tidak Baik / Tidak Setuju	1
Kurang Memadai / Kurang Baik / Kurang Setuju	2
Cukup Memadai / Cukup Baik / Cukup Setuju	3
Memadai / Baik / Setuju	4
Sangat Memadai / Sangat Baik / Sangat Setuju	5

Sumber : (Sugiyono, 2010)

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner selanjutnya dilakukan pengujian terlebih dahulu yang meliputi uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*).

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar dapat mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul dapat dipercaya. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat validitas dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Pengujian validitas menurut (Sugiyono, 2010) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keaslian suatu instrument dianggap valid mampu mengukur apa yang ingin diukur, dengan kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS, bila semua pertanyaan yang disusun berkorelasi positif dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas (Kaplan, 2005). Metode yang digunakan adalah *product moment pearson* menggunakan bantuan program SPSS 21.0 dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Korelasi *product moment pearson* item dengan soal

$\sum X$ = Total nilai keseluruhan subjek per item

$\sum Y$ = Total nilai per subjek

N = Jumlah subjek

Nilai korelasi (r) dapat dilihat dari tabel *correlation* kolom skor total baris *pearson correlation*. Menurut (Sugiyono, 2010), menyatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,5 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* kuat atau bisa disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of significant* sebesar 5% dengan interpretasi data jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti instrumen dinyatakan valid.

Berikut hasil dari uji validitas pada penelitian ini :

Tabel III-4. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Indeks Validitas	Item Pertanyaan	Indeks Validitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Ketersediaan Anggaran	
Item 1	0,366 > 0,30 = Valid	Item 1	0,498 > 0,30 = Valid
Item 2	0,542 > 0,30 = Valid	Item 2	0,369 > 0,30 = Valid
Item 3	0,581 > 0,30 = Valid	Item 3	0,369 > 0,30 = Valid
Item 4	0,656 > 0,30 = Valid	Item 4	0,544 > 0,30 = Valid
Item 5	0,542 > 0,30 = Valid	Item 5	0,498 > 0,30 = Valid
Item 6	0,609 > 0,30 = Valid	Item 6	0,544 > 0,30 = Valid
Item 7	0,542 > 0,30 = Valid	Item 7	0,498 > 0,30 = Valid
Item 8	0,657 > 0,30 = Valid	Item 8	0,369 > 0,30 = Valid
Item 9	0,464 > 0,30 = Valid	Item 9	0,369 > 0,30 = Valid
Item 10	0,464 > 0,30 = Valid	Item 10	0,530 > 0,30 = Valid
Item 11	0,542 > 0,30 = Valid	Item 11	0,648 > 0,30 = Valid
Item 12	0,366 > 0,30 = Valid	Item 12	0,573 > 0,30 = Valid
Item 13	0,542 > 0,30 = Valid	Item 13	0,369 > 0,30 = Valid
Item 14	0,581 > 0,30 = Valid	Item 14	0,422 > 0,30 = Valid
Item 15	0,656 > 0,30 = Valid		
Item 16	0,542 > 0,30 = Valid	Ef. Penerapan Sist. Inf. Keu. Daerah	
Item 17	0,609 > 0,30 = Valid	Item 1	0,549 > 0,30 = Valid
Item 18	0,542 > 0,30 = Valid	Item 2	0,426 > 0,30 = Valid
Item 19	0,657 > 0,30 = Valid	Item 3	0,607 > 0,30 = Valid
Item 20	0,464 > 0,30 = Valid	Item 4	0,549 > 0,30 = Valid
Item 21	0,581 > 0,30 = Valid	Item 5	0,475 > 0,30 = Valid
Item 22	0,464 > 0,30 = Valid	Item 6	0,702 > 0,30 = Valid
Item 23	0,542 > 0,30 = Valid	Item 7	0,631 > 0,30 = Valid
Item 24	0,366 > 0,30 = Valid	Item 8	0,699 > 0,30 = Valid
Item 25	0,542 > 0,30 = Valid	Item 9	0,508 > 0,30 = Valid
Item 26	0,581 > 0,30 = Valid	Item 10	0,549 > 0,30 = Valid
Item 27	0,366 > 0,30 = Valid	Item 11	0,475 > 0,30 = Valid
Item 28	0,542 > 0,30 = Valid	Item 12	0,672 > 0,30 = Valid
Item 29	0,581 > 0,30 = Valid	Item 13	0,631 > 0,30 = Valid
Item 30	0,656 > 0,30 = Valid	Item 14	0,699 > 0,30 = Valid
Item 31	0,542 > 0,30 = Valid	Item 15	0,545 > 0,30 = Valid
Item 32	0,609 > 0,30 = Valid	Item 16	0,561 > 0,30 = Valid
Item 33	0,542 > 0,30 = Valid	Item 17	0,322 > 0,30 = Valid
Item 34	0,657 > 0,30 = Valid	Item 18	0,582 > 0,30 = Valid
Item 35	0,464 > 0,30 = Valid	Item 19	0,503 > 0,30 = Valid
Item 36	0,581 > 0,30 = Valid	Item 20	0,549 > 0,30 = Valid
Item 37	0,464 > 0,30 = Valid	Item 21	0,549 > 0,30 = Valid
Item 38	0,542 > 0,30 = Valid	Item 22	0,549 > 0,30 = Valid
Item 39	0,544 > 0,30 = Valid	Item 23	0,426 > 0,30 = Valid
		Item 24	0,607 > 0,30 = Valid
Kualitas Laporan Keuangan		Item 25	0,547 > 0,30 = Valid
Item 1	0,454 > 0,30 = Valid	Item 26	0,699 > 0,30 = Valid
Item 2	0,549 > 0,30 = Valid	Item 27	0,508 > 0,30 = Valid
Item 3	0,553 > 0,30 = Valid	Item 28	0,532 > 0,30 = Valid
Item 4	0,549 > 0,30 = Valid	Item 29	0,534 > 0,30 = Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk menentukan tingkat keandalan kuesioner dengan cara pengukuran sekali saja (*one shot*). Menurut (Kaplan, 2005) suatu *construct* variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar (>) dari 0,70. Untuk menguji reliabilitas maka digunakan rumus *Alpha* sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b$ = Jumlah varians butir

σ_t = Varians total

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 21.0 diperoleh perhitungan uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel III-5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Number of Item</i>	Hasil Uji
X ₁ (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	0,953	39	Reliabel
X ₂ (Ketersediaan Anggaran)	0,923	14	Reliabel
Y ₁ (Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah)	0,949	29	Reliabel
Y ₂ (Kualitas Laporan Keuangan)	0,844	4	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh saran secara operasional.

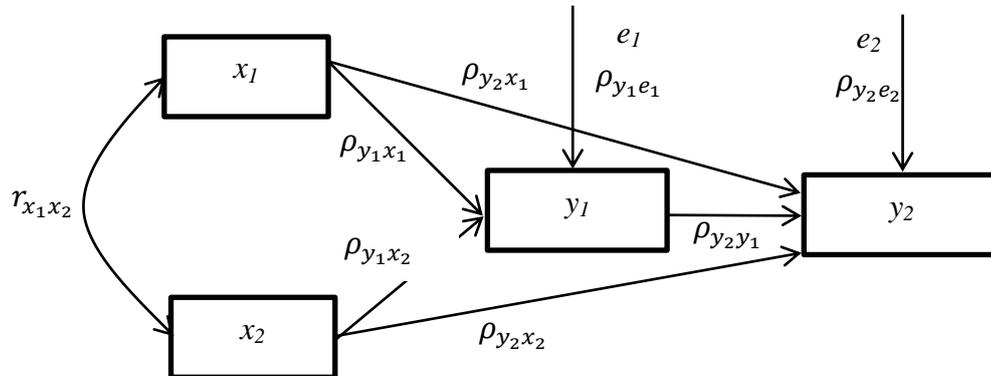
2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Rutherford, 1993).

a. Persamaan Struktur dan Diagram Jalur

Langkah awal penerapan model analisis jalur adalah merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan pengaruh antar variabel yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Pengaruh langsung adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa melalui variabel endogen lain, sedang pengaruh tidak langsung adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis. Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Adapun model diagram jalur penelitian ini berdasarkan paradigma hubungan antar-variabel adalah sebagai berikut:



Gambar III.1.

Hubungan Struktural Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Keterangan:

- x_1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- x_2 = Ketersediaan Anggaran
- y_1 = Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- y_2 = Kualitas Laporan Keuangan
- e_1 = Merupakan variabel lain yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah tetapi tidak diteliti
- e_2 = Merupakan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi tidak diteliti
- $\rho_{y_1x_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_1 terhadap y_1
- $\rho_{y_1x_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_2 terhadap y_1
- $\rho_{y_2x_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_1 terhadap y_2
- $\rho_{y_2x_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_2 terhadap y_2
- $\rho_{y_2y_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel y_1 terhadap y_2
- $\rho_{y_1e_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel lain yang mempengaruhi variabel y_1
- $\rho_{y_2e_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel lain yang mempengaruhi variabel y_2

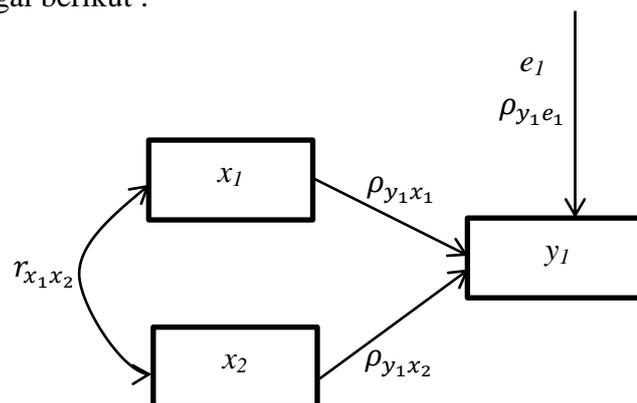
Paradigma hubungan struktural antar variabel terdiri dari dua substruktur yaitu sebagai berikut :

Sub-struktur 1 :

Sub-struktur pertama mengidentifikasi pengaruh variabel SPIP (x_1), ketersediaan anggaran (x_2) terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1). Pengaruh variabel ditentukan melalui koefisien jalur, seperti tertulis dalam persamaan struktural sebagai berikut:

$$y_1 = \rho_{y_1x_1}x_1 + \rho_{y_1x_2}x_2 + \rho_{y_1e_1}$$

Keterkaitan antar variabel dari persamaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :



Gambar III.2.
Sub-struktur 1. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Uji hipotesis untuk pengaruh dari variabel x_1 dan x_2 terhadap variabel y_1 dilakukan dengan menguji hipotesis berikut :

$$H_0 : \rho_{y_1x_i} = 0, y_1 \text{ tidak dipengaruhi variabel } x_i$$

$$H_1 : \rho_{y_1x_i} > 0, y_1 \text{ dipengaruhi oleh variabel } x_i$$

Sedangkan untuk hubungan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini :

Tabel III-6. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pengaruh Variabel	Pengaruh			Total
	langsung	tidak langsung		
		melalui x_1	melalui x_2	
x_1 terhadap y_1	(a)		(c)	(a)+(c) =(e)
x_2 terhadap y_1	(b)	(d)		(b)+(d) =(f)
Pengaruh secara simultan				(e)+(f)=(g)
Pengaruh variabel luar				1-(g)

Keterangan:

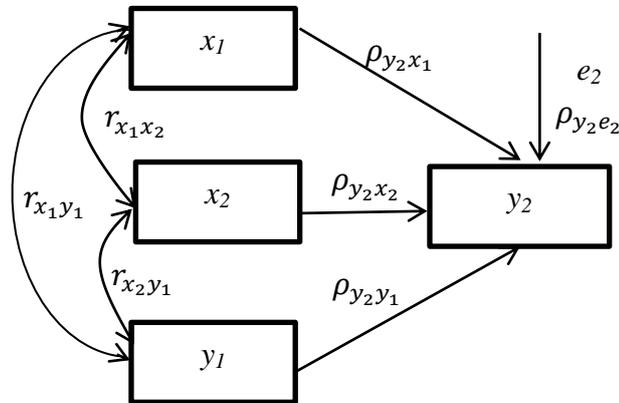
- (a) = $\rho_{y_1x_1} \cdot \rho_{y_1x_1}$
 (b) = $\rho_{y_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2}$
 (c) = $\rho_{y_1x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2}$
 (d) = $\rho_{y_1x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_1}$

Sub-struktur 2 :

Sub-struktur kedua mengidentifikasi pengaruh variabel SPIP (x_1), ketersediaan anggaran (x_2) dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1) terhadap kualitas laporan keuangan (y_2). Pengaruh variabel ditentukan melalui koefisien jalur, seperti tertulis dalam persamaan struktural sebagai berikut:

$$y_2 = \rho_{y_2x_1}x_1 + \rho_{y_2x_2}x_2 + \rho_{y_2y_1}y_1 + \rho_{y_2e_2}$$

Keterkaitan antar variabel dari persamaan ini dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :



Gambar III.3.
Sub-struktur 2. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji hipotesis untuk pengaruh dari variabel x_1, x_2, y_1 terhadap variabel y_2 dilakukan dengan menguji hipotesis berikut:

$$H_0 : \rho_{y_2x_i} = 0, y_2 \text{ tidak dipengaruhi variabel } x_i$$

$$H_1 : \rho_{y_2x_i} > 0, y_2 \text{ dipengaruhi oleh variabel } x_i$$

dimana $i = 1,2$

$$H_0 : \rho_{y_2y_1} = 0, y_2 \text{ tidak dipengaruhi variabel } y_1$$

$$H_1 : \rho_{y_2y_1} > 0, y_2 \text{ dipengaruhi oleh variabel } y_1$$

Sedangkan untuk hubungan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada tabel III-4. berikut ini :

Tabel III-7. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Variabel	Pengaruh				Total
	langsung	tidak langsung			
		melalui x_1	melalui x_2	melalui y_1	
x_1 terhadap y_2	(a)		(d)	(e)	(a)+(d)+(e) = (j)
x_2 terhadap y_2	(b)	(f)		(g)	(b)+(f)+(g) = (k)
y_1 terhadap y_2	(c)	(h)	(i)		(c)+(h)+(i) = (l)
Pengaruh secara simultan					(j)+(k)+(l) = (m)
Pengaruh variabel luar					1-(m)

Keterangan:

- (a) = $\rho_{y_2x_1} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (b) = $\rho_{y_2x_2} \cdot \rho_{y_2x_2}$
- (c) = $\rho_{y_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (d) = $\rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_2}$
- (e) = $\rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (f) = $\rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (g) = $\rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (h) = $\rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (i) = $\rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2x_2}$

b. Uji Signifikansi Koefisien Analisis Jalur

Karena koefisien analisis jalur dihitung dari analisis regresi, koefisien analisis jalur dapat diuji tingkat signifikansinya yaitu pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen dengan menggunakan uji statistika t sebagaimana di dalam analisis regresi berganda. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t kritisnya atau *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi α maka variabel endogen signifikan. Oleh karena itu, hipotesis nol bahwa koefisien analisis jalur sama dengan nol ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara dua variabel sebagaimana

dijelaskan dalam hubungan di dalam analisis jalur. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari nilai t kritisnya atau p -value lebih besar dari tingkat signifikansi α maka variabel endogen tidak signifikan. Hipotesis nol bahwa koefisien analisis jalur sama dengan nol diterima. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel sebagaimana dijelaskan dalam hubungan di dalam analisis jalur (Widarjono, 2015).

c. Uji Kelayakan Model

Kelayakan model analisis jalur dapat diuji dengan menggunakan beberapa uji statistika. Kelayakan model analisis jalur dapat diuji dengan menggunakan beberapa uji statistika. Salah satunya adalah uji F yang sering digunakan dalam regresi sederhana maupun regresi majemuk. Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka kita menolak H_0 atau dengan kata lain bahwa paling tidak ada satu slope regresi yang signifikan secara statistik (Pardede, R., & Manurung, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu berjumlah 34 Pemerintah Daerah dengan rincian 1 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV-1. Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Pemerintah Daerah	No	Nama Pemerintah Daerah
1	Provinsi Sumatera Utara	18	Kabupaten Padang Lawas Utara
2	Kabupaten Asahan	19	Kabupaten Pakpak Bharat
3	Kabupaten Batubara	20	Kabupaten Samosir
4	Kabupaten Dairi	21	Kabupaten Serdang Bedagai
5	Kabupaten Deli Serdang	22	Kabupaten Simalungun
6	Kabupaten Humbang Hansudutan	23	Kabupaten Tapanuli Selatan
7	Kabupaten Karo	24	Kabupaten Tapanuli Tengah
8	Kabupaten Labuhan Batu	25	Kabupaten Tapanuli Utara
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	26	Kabupaten Toba Samosir
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	27	Kota Binjai
11	Kabupaten Langkat	28	Kota Gunung Sitoli
12	Kabupaten Mandailing Natal	29	Kota Medan
13	Kabupaten Nias	30	Kota Padangsidimpuan
14	Kabupaten Nias Barat	31	Kota Pematangsiantar
15	Kabupaten Nias Selatan	32	Kota Sibolga
16	Kabupaten Nias Utara	33	Kota Tanjung Balai
17	Kabupaten Padang Lawas	34	Kota Tebing Tinggi

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sekaligus sampel penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan / Kepala Bidang Akuntansi selaku unit yang memiliki fungsi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dan yang menjadi responden pada Inspektorat Daerah adalah Inspektur / Irbanselaku unit yang memiliki fungsi sebagai aparatur pengawas internal pemerintah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan dan mengumpulkan kuesioner yang disebar pada Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Utara dengan cara mendatangi / menyurati secara langsung ke alamat Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV-2. Rekapitulasi Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Unit Analisis	Jumlah kuesioner disebar		Jumlah kuesioner kembali		% Pengembalian	
		Entitas	Responden	Entitas	Responden	Entitas	Responden
1	BPKAD Provinsi dan Kab/Kota	34	34	34	34	100	100%
2	Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota	34	34	34	34	100	100%
Total		68	68	68	68	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 34 Pemerintah Daerah telah mengembalikan kuesioner, sedangkan tingkat pengembalian kuesioner berdasarkan jumlah responden adalah sebanyak 68 kuesioner dengan persentase tingkat pengembalian kuesioner oleh responden adalah sekitar 100%.

Karakteristik responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner ini yang meliputi : usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, masa kerja, lama menjabat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV-3. Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	%	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	43	63,23 %
		Perempuan	25	36,77 %
		Tidak Ada Informasi	-	0,00 %
Usia	:	< 35 Tahun	-	0,00 %
		35 – 40 Tahun	7	10,29 %
		41 – 45 Tahun	22	32,35 %
		46 – 50 Tahun	36	52,94 %
		> 50 Tahun	3	4,42 %
		Tidak Ada Informasi	-	0 %
Jenjang Pendidikan	:	D3	-	0 %
		S-1	47	69,11 %
		S-2	21	30,89 %
		S-3	-	0 %
		Tidak Ada Informasi	-	0 %
Masa Kerja	:	< 5 Tahun	-	0 %
		5 – 10 Tahun	4	5,88 %
		11 – 15 Tahun	13	19,11 %
		16 – 20 Tahun	22	32,35 %
		> 20 Tahun	29	42,66%
		Tidak Ada Informasi	-	0 %
Masa Kerja Jabatan	:	< 2 Tahun	11	16,17%
		2 – 4 Tahun	29	42,64%
		5 – 7 Tahun	24	35,29%
		> 7 Tahun	4	5,90 %
		Tidak Ada Informasi	-	0 %

Berdasarkan tabel IV-3. di atas terlihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki (63,23%). Dilihat berdasarkan usia, bahwa sebagian besar responden berusia 46 – 50 tahun (52,94%), sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar responden berlatar belakang pendidikan Sarjana / S-1 (69,11%). Kemudian dilihat dari masa kerja responden, sebagian besar responden sudah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun (42,66%). Dan yang paling terakhir adalah masa kerja jabatan responden sebagian besar adalah berkisar antara 2 – 4 tahun (42,64%).

Selanjutnya dapat dijelaskan profil atau gambaran umum dari Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4. Profil/Gambaran Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Karakteristik	Jumlah	%	
1	Peralatan Personal Computer yang digunakan saat ini :	Khusus disediakan untuk masing-masing staf	33	97,05%
		Dipakai bersama-sama / bergantian dengan staf lain	1	2,95%
		Lainnya	-	0,00%
2	SIKD yang digunakan saat ini :	SIMDA – BPKP	30	88,23%
		Dibangun sendiri oleh Pemda	4	11,77%
		Dibangun oleh instansi di luar Pemda	-	0,00%
3	Infrastruktur yang tersedia untuk digunakan sebagai penunjang SIKD :	Jaringan Internet	34	100 %
		Wi-fi	34	100 %
		UPS	34	100 %
		Ruang Khusus SIKD	28	82,35%
		Helpdesk	28	82,35%
		Lainnya	-	0,00%

Sumber : Data diolah

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebahagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Utara menggunakan SIMDA BPKP sebagai sistem informasi keuangan daerah. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kelancaran operasional sistem informasi tersebut sudah cukup memadai, dimana peralatan personal komputer umumnya tersedia untuk masing-masing staf dan juga didukung oleh infrastruktur seperti jaringan internet, *Wifi*, *UPS*, dan adanya ruang khusus SIKD.

3. Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2010) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum

dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

Tabel IV-5. Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Interval Penilaian	Kategori
1,00 – 1,80	0,00 – 20,00	Tidak Memadai / Tidak Baik / Tidak Setuju
1,81 – 2,60	20,01 – 40,00	Kurang Memadai / Kurang Baik / Kurang Setuju
2,61 – 3,40	40,01 – 60,00	Cukup Memadai / Cukup Baik / Cukup Setuju
3,41 – 4,20	60,01 – 80,00	Memadai / Baik / Setuju
4,21 – 5,00	80,01 – 100,0	Sangat Memadai / SAngat Baik / Sangat Setuju

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah diukur melalui lima dimensi dan dioperasionalkan menjadi dua puluh satu indikator. Dimensi dari sistem pengendalian intern pemerintah meliputi lingkungan pengendalian terdiri dari delapan indikator, penilaian resiko terdiri dari tiga indikator, pengendalian aktivitas terdiri dari lima indikator, sistem informasi dan komunikasi terdiri dari dua indikator, dan pemantauan terdiri dari tiga indikator. Rekapitulasi persentase skor dan distribusi tanggapan responden mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-6. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
		SM	M	CM	KM	TM		
1	Lingkungan Pengendalian							
1.1	Integritas dan Nilai Etika	6	46	15	1	0	3,80	Memadai
1.2	Komitmen Terhadap Kompetensi	8	45	14	2	0	3,87	Memadai
1.3	Kepemimpinan Yang Kondusif	10	37	21	1	1	3,79	Memadai
1.4	Struktur Organisasi	15	42	11	1	1	4,01	Memadai
1.5	Tanggung Jawab dan Wewenang	10	40	18	1	0	3,86	Memadai
1.6	Kebijakan dan Praktik SDM	9	44	14	1	0	3,90	Memadai
1.7	Peran APIP	8	41	17	1	0	3,80	Memadai
1.8	Hubungan Kerja Yang Baik	12	38	17	1	0	3,90	Memadai
Total Skor							3,87	Memadai
2	Penilaian Risiko							
2.1	Identifikasi Risiko	15	42	11	1	1	4,01	Memadai
2.2	Analisis Risiko	10	40	18	1	0	3,86	Memadai
2.3	Pengelolaan Risiko	14	39	16	0	0	3,98	Memadai
Total Skor							3,95	Memadai
3	Aktivitas Pengendalian							
3.1	Review terhadap kinerja	7	46	14	1	0	3,88	Memadai
3.2	Pengelolaan informasi	8	42	17	2	0	3,83	Memadai
3.3	Pengendalian fisik asset	8	42	18	1	1	3,80	Memadai
3.4	Pemisahan tugas dan fungsi	17	36	14	1	1	4,00	Memadai
3.5	Pencatatan dan dokumentasi	7	49	12	0	0	3,93	Memadai
Total Skor							3,89	Memadai
4	Informasi dan Komunikasi							
4.1	Pengelolaan informasi	10	40	17	1	0	3,86	Memadai
4.2	Pemanfaatan sarana komunikasi	14	38	16	0	0	3,98	Memadai
Total Skor							3,92	Memadai
5	Pemantauan							
5.1	Pemantauan berkelanjutan	10	46	12	0	0	3,97	Memadai
5.2	Evaluasi terpisah	10	46	12	0	0	3,97	Memadai
5.3	Tindak lanjut rekomendasi	11	43	13	1	0	3,94	Memadai
Total Skor							3,96	Memadai
Total Skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							3,92	Memadai

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, responden memberikan tanggapan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memadai (3,92). Skor maksimum rata-rata tanggapan responden adalah pada dimensi pengendalian terletak pada pemantauan yaitu sebesar 3,96. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui inspektorat daerah selaku unit yang berfungsi melakukan sistem pengendalian internal telah melaksanakan pemantauan terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan skor minimum rata-rata tanggapan responden adalah pada lingkungan pengendalian. Hal ini terjadi karena lingkungan pengendalian yang harus dibangun pada pemerintah daerah meliputi beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait yang harus bersinergi secara komprehensif untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hal ini membutuhkan komitmen baik dari pimpinan dan seluruh pihak yang terkait agar dapat membangun lingkungan pengendalian yang memadai dan optimal.

b. Ketersediaan Anggaran

Variabel ketersediaan anggaran diukur dengan menggunakan tiga dimensi dan dioperasionalkan menjadi sembilan indikator. Berikut rekapitulasi persentase skor dan distribusi tanggapan serta nilai kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengenai ketersediaan anggaran.

Tabel IV-7. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Ketersediaan Anggaran

No	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Sumber Anggaran							
1.1	Pentingnya penganggaran Sumber APBN	20	41	6	0	1	4,16	Setuju
1.2	Pentingnya penganggaran Sumber APBD	15	44	10	0	0	4,06	Setuju
Total Skor							4,11	Setuju
2	Alokasi Anggaran							
2.1	Alokasi Perencanaan	20	41	6	0	1	4,16	Setuju
2.2	Alokasi Sosialisasi	20	41	6	0	1	4,16	Setuju
2.3	Alokasi Pelaksanaan	11	50	6	1	0	4,07	Setuju
2.4	Alokasi Pengendalian	14	39	15	0	0	3,99	Setuju
Total Skor							4,10	Setuju
3	Kemampuan Pengelolaan Anggaran							
3.1	Tujuan / Sasaran Anggaran	17	37	14	0	0	4,04	Setuju
3.2	Standar / Prosedur Penyusunan Anggaran	9	38	22	0	0	3,81	Setuju
3.3	Indikator Kinerja Anggaran	9	35	23	1	0	3,76	Setuju
Total Skor							3,87	Setuju
Total Skor Ketersediaan Anggaran							4,03	Setuju

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ketersediaan anggaran diperlukan untuk menunjang operasional pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah. Skor maksimum rata-rata tanggapan responden adalah pada dimensi sumber anggaran yaitu sebesar 4,11. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggap bahwa sumber dana baik yang berasal dari APBN maupun APBD sangat diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan perawatan sistem informasi keuangan secara rutin setiap tahunnya. Sedangkan skor minimum rata-rata tanggapan responden adalah pada kemampuan dalam pengelolaan anggaran yaitu sebesar 3,87. Hal ini berarti Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) masih harus lebih meningkatkan kemampuan personil dalam mengelola anggaran daerah yaitu dengan harus memperhatikan tujuan dan sasaran anggaran, standar dan prosedur penyusunan anggaran serta penyusunan indikator kinerja anggaran.

c. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Variabel efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah diukur dengan menggunakan lima dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi enam belas indikator. Berikut rekapitulasi persentase skor dan distribusi tanggapan serta nilai kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengenai efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah

Tabel IV-8. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

No	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Kualitas Sistem							
1.1	Keandalan Sistem	24	44	0	0	0	4,35	Sangat Baik
1.2	Sistem yang Fleksibel	6	51	11	0	0	3,93	Baik
1.3	Sistem yang Terintegrasi	14	39	15	0	0	3,99	Baik
1.4	Pentingnya Sistem	12	43	13	0	0	3,99	Baik
Total Skor							4,06	Baik
2	Kualitas Informasi							
2.1	Akurat	13	37	15	4	0	3,87	Baik
2.2	Tepat Waktu	6	29	25	7	2	3,43	Baik
2.3	Komplit dan Relevan	9	43	16	0	0	3,91	Baik
Total Skor							3,74	Baik
3	Penggunaan Sistem							
3.1	Pelayanan Sistem	15	45	9	0	0	4,03	Baik
3.2	Kemudahan Sistem	13	39	14	2	0	3,91	Baik
3.3	Kesesuaian Sistem	15	45	9	0	0	4,09	Baik
Total Skor							4,03	Baik
4	Dampak Individual							
4.1	Keyakinan Diri	24	44	0	0	0	4,35	Sangat Baik
4.2	Kunjungan Berulang	6	51	11	0	0	3,93	Baik
4.3	Risiko Yang Diterima	14	39	15	0	0	3,99	Baik
4.4	Senang Menggunakan Sistem	12	40	15	2	0	3,90	Baik
Total Skor							4,04	Baik
5	Dampak Organisasi							
5.1	Efektivitas Informasi	10	34	14	8	2	3,62	Baik
5.2	Efisiensi Biaya	10	32	26	1	0	3,74	Baik
Total Skor							3,68	Baik
Total Skor Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah							3,91	Baik

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah termasuk dalam kategori baik (3,91). Hal ini berarti bahwa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan telah berjalan dengan baik. Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, hampir seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara yaitu 30 Pemerintah Daerah (1 Provinsi dan 29 Kabupaten/Kota) menggunakan SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sistem informasi keuangannya dan ada empat daerah yang membangun sistem keuangannya sendiri.

Skor maksimum rata-rata tanggapan responden adalah pada dimensi kualitas sistem yaitu sebesar 4,06. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggap bahwa SIMDA yang digunakan sebagai sistem informasi keuangan daerah memiliki kualitas yang cukup baik. Sedangkan skor minimum rata-rata tanggapan responden adalah pada dimensi dampak organisasi. Dalam hal ini meskipun SIMDA sebagai sistem informasi keuangan daerah sudah menghasilkan efektivitas informasi dan efisiensi biaya bagi organisasi Pemerintah Daerah, namun untuk kedepannya harus dilakukan evaluasi apakah Pemerintah Daerah tetap menggunakan SIMDA atau membangun sistem informasi keuangannya sendiri.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu relevan, andal dan tepat waktu. Dimensi relevan dilihat dari sudut pandang responden atas opini yang diberikan oleh BPK dan kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimensi andal dilihat dari indikator penyajian fakta secara jujur dan dimensi ketepatan waktu menggambarkan ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD ke BPK. Rekapitulasi tanggapan responden atas dimensi pada variabel kualitas laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV-9. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kualitas Laporan Keuangan

No	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Relevan							
1.1	Opini yang diberikan oleh BPK-RI	8	38	22	0	0	3,79	Setuju
1.2	Kesesuaian dengan SAP	4	45	19	0	0	3,78	Setuju
Total Skor							3,79	Setuju
2	Andal							
2.1	Penyajian fakta secara jujur	6	55	7	0	0	3,99	Setuju
Total Skor							3,99	Setuju
3	Timeliness							
3.1	Ketepatan waktu penyampaian LKPD	4	40	24	0	0	3,71	Setuju
Total Skor							3,71	Setuju
Total Skor Kualitas Laporan Keuangan							3,82	Setuju

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa laporan keuangan berkualitas terdiri dari beberapa unsur yaitu melalui opini yang diberikan oleh BPK-RI selaku auditor eksternal pemerintah daerah, penyajian informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material, dan laporan disampaikan secara tepat waktu. Gambaran umum atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara pada tahun 2017 yang dilihat melalui opini BPK adalah hanya sebanyak 41% (14 pemerintah daerah) yang memperoleh opini WTP dan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret adalah sebanyak 62%.

4. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yang akan dijelaskan dalam penelitian ini terdiri atas jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan

standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Hasil pengolahan data analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-10. Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (x_1), Ketersediaan Anggaran (x_2), dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (y_1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP	68	112	186	151,93	12,979
KA	68	45	74	60,34	5,449
EFSIA	68	92	132	113,62	8,951
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Output SPSS, data diolah

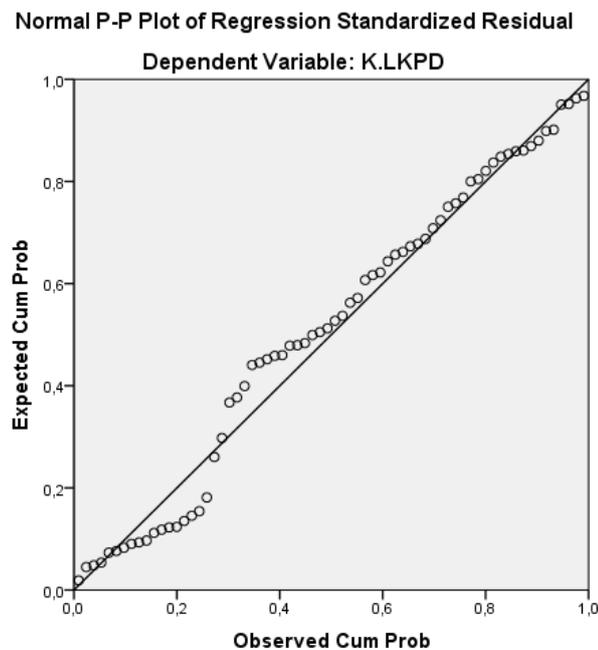
Dari tabel IV-10 deskripsi statistik variabel penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 68 orang. Masing- masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

- a. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 112 dan nilai maksimum sebesar 186. Nilai rata-rata kompetensi responden adalah 151,93. Nilai standar deviasi sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 12,979.
- b. Variabel ketersediaan anggaran (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 45 dan nilai maksimum sebesar 74. Nilai rata-rata kompetensi responden adalah 60,34. Nilai standar deviasi ketersediaan anggaran adalah sebesar 5,449.
- c. Variabel efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (Y_1) memiliki nilai minimum sebesar 92 dan nilai maksimum sebesar 132. Nilai

rata-rata efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah 113,62. Nilai standar deviasi ketersediaan anggaran adalah sebesar 8,951.

5. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas data penelitian ini menggunakan analisis grafik. Analisis grafik untuk melihat normalitas dilakukan dengan melihat kurva normal *probability plot*. Berikut adalah gambar grafik normal *probability plot*.



Gambar IV.1.
Grafik Normal P-Plot

Pada gambar IV.1. terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel dependen (kualitas laporan keuangan) memenuhi asumsi normalitas.

6. Analisis Korelasi Antar Variabel

Analisis korelasi antar variabel digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dengan menggunakan SPSS, korelasi antar variabel digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV-11. Analisis Korelasi Antar Variabel

Correlations				
		SPIP	KA	EFSIA
SPIP	Pearson Correlation	1	,326**	,254
	Sig. (2-tailed)		,007	,036
	N	68	68	68
KA	Pearson Correlation	,326**	1	,344**
	Sig. (2-tailed)	,007		,004
	N	68	68	68
EFSIA	Pearson Correlation	,254	,344**	1
	Sig. (2-tailed)	,036	,004	
	N	68	68	68

Sumber : Output SPSS, data diolah

Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1 dan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi seperti dinyatakan oleh (Sugiyono, 2007) adalah sebagai berikut:

0,000 – 0,199 = sangat rendah;

0,200 – 0,399 = rendah;

0,400 – 0,599 = sedang;

0,600 – 0,799 = kuat;

0,800 – 1,000 = sangat kuat.

Selanjutnya nilai positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik.

Berdasarkan tabel IV-11. di atas maka korelasi antar variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Korelasi x_1 dan $x_2 = 0.326$ yang artinya variabel sistem pengendalian internal dan ketersediaan anggaran memiliki hubungan yang rendah. Selanjutnya arah positif menunjukkan bahwa perubahan antara satu variabel akan mengakibatkan perubahan terhadap variabel lainnya dengan arah yang sama atau hubungan searah.
- b. Korelasi x_1 dan $y_1 = 0.254$ yang artinya variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah memiliki keeratan hubungan yang rendah. Selanjutnya arah positif menunjukkan bahwa perubahan antara satu variabel akan mengakibatkan perubahan terhadap variabel lainnya dengan arah yang sama atau hubungan searah.
- c. Korelasi x_2 dan $y_1 = 0.344$ yang artinya variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah memiliki keeratan hubungan yang rendah. Selanjutnya arah positif menunjukkan bahwa perubahan antara satu variabel akan mengakibatkan perubahan terhadap variabel lainnya dengan arah yang sama atau hubungan searah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki koefisien korelasi paling tinggi adalah antara ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.344. Meskipun keeratan hubungannya rendah, tetapi kedua variabel ini menunjukkan hubungan yang searah. Sedangkan variabel yang memiliki koefisien korelasi paling rendah adalah antara sistem pengendalian intern pemerintah dan

efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.254 dan dengan tanda positif menunjukkan hubungan yang searah.

7. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang dilakukan dengan mengolah data dengan menggunakan SPSS dengan alat analisis jalur (*Path Analysis*).

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi dari suatu model penelitian melalui variabel perantara di mana pada penelitian ini adalah variabel efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Pada penelitian ini, analisis jalur dilakukan pada 2 bentuk sub-struktur. Hasil analisis jalur yang dilakukan pada sub-struktur 1 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV-12. Hasil Analisis Jalur *R Square* Regresi Sub-struktur 1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,376 ^a	,141	,115	8,422
a. Predictors: (Constant), KA, SPIP				
b. Dependent Variable: EFSIA				

Sumber : Output SPSS, data diolah

Tabel IV-13. Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Regresi Sub-struktur 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67,987	14,438		4,709	,000
	SPIP	,110	,084	,159	1,307	,196
	KA	,480	,200	,292	2,404	,019

a. Dependent Variable: EFSIA

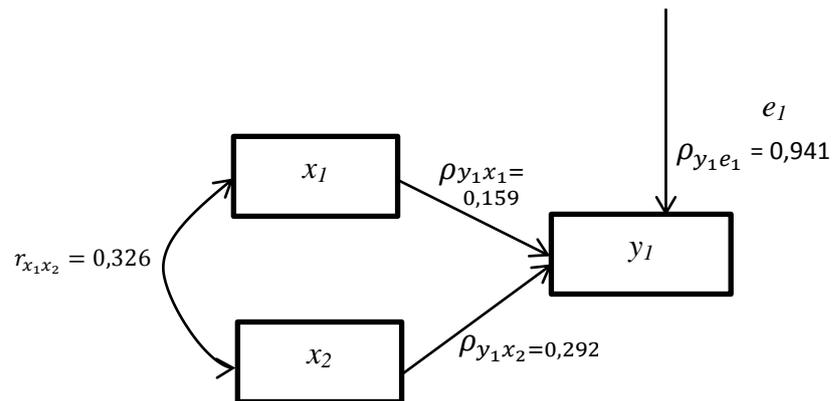
Sumber : Output SPSS, data diolah

Dari tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Standardized Coefficients*) terlihat nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien x_1 adalah $\rho_{y_1x_1} = 0.159$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 1.
- Koefisien x_2 adalah $\rho_{y_1x_2} = 0.292$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 1.

Sedangkan dari tabel *Model Summary* di atas nilai *Adjusted R Square* adalah 0.115. Nilai ini dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien jalur residualnya yaitu: $\rho_{y_1\varepsilon_1} = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{(1 - 0.115)} = 0.941$

Koefisien-koefisien dan korelasi yang telah diperoleh pada analisis korelasi sebelumnya di atas dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 1 sebagai berikut :



Gambar IV.1.
Sub-struktur 1. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dari gambar di atas terlihat besarnya hubungan antar variabel. Model persamaannya adalah: $y_1 = 0.159x_1 + 0.292x_2 + 0.941$. Untuk hubungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dihitung seperti berikut ini :

- (a) $= \rho_{y_1x_1} \cdot \rho_{y_1x_1} = 0.159 \cdot 0.159 = 0.025$
- (b) $= \rho_{y_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2} = 0.292 \cdot 0.292 = 0.085$
- (c) $= \rho_{y_1x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2} = 0,159 \cdot 0,326 \cdot 0,292 = 0.015$
- (d) $= \rho_{y_1x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_1} = 0,292 \cdot 0,326 \cdot 0,159 = 0.015$

Tabel IV-14. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengaruh Variabel	Pengaruh			Total
	langsung	tidak langsung		
		melalui x_1	melalui x_2	
x_1 terhadap y_1	0.025		0.015	0,04
x_2 terhadap y_1	0.085	0.015		0,10
Pengaruh secara simultan				0,14
Pengaruh variabel luar				0,86

Sumber : Output SPSS, data diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil pengaruh sistem pengendalian internal dan ketersediaan anggaran secara simultan terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 0.141 atau merupakan nilai R^2 yang diperoleh dari *model summary* yang dihasilkan oleh SPSS.

Hasil analisis jalur yang dilakukan pada sub-struktur 2 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV-15. Hasil Analisis Jalur R Square Regresi Sub-struktur 2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444 ^a	,197	,160	1,185
a. Predictors: (Constant), EFSIA, SPIP, KA				
b. Dependent Variable: K.LKPD				

Sumber : Output SPSS, data diolah

Tabel IV-16. Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Regresi Sub-struktur 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,720	2,353		3,706	,000
	SPIP	,034	,012	,342	2,848	,006
	KA	-,056	,029	-,235	-1,901	,062
	EFSIA	,039	,017	,273	2,255	,028
a. Dependent Variable: K.LKPD						

Sumber : Output SPSS, data diolah

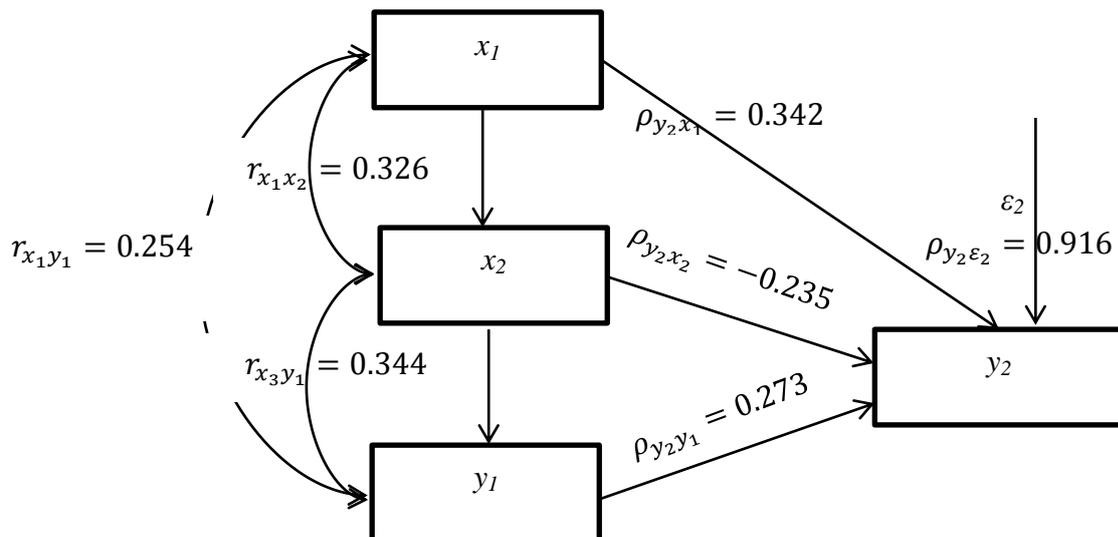
Dari tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Standardized Coefficients*) terlihat nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien x_1 adalah $\rho_{y_2x_1} = 0.342$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.

- Koefisien x_2 adalah $\rho_{y_2x_2} = -0.235$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.
- Koefisien y_1 adalah $\rho_{y_2y_1} = 0.273$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.

Sedangkan dari tabel *Model Summary* di atas nilai *Adjusted R Square* adalah 0.160. Nilai ini dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien jalur residualnya yaitu: $\rho_{y_2\varepsilon_2} = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{(1 - 0,160)} = 0.916$

Koefisien-koefisien dan korelasi yang telah diperoleh pada analisis korelasi sebelumnya di atas dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2 sebagai berikut :



Gambar IV.2.
Hasil Pengujian Sub-struktur 2:
Sub-struktur 2. Pengaruh SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari gambar di atas terlihat besarnya hubungan antar variabel. Model persamaannya adalah: $y_2 = 0.342x_1 - 0.235x_2 + 0.273y_1 + 0.916$. Untuk hubungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dihitung seperti berikut ini :

- (a) $= \rho_{y_2x_1} \cdot \rho_{y_2x_1} = 0.342 \cdot 0.342 = 0.116$
 (b) $= \rho_{y_2x_2} \cdot \rho_{y_2x_2} = -0.235 \cdot -0.235 = 0.055$
 (c) $= \rho_{y_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = 0.273 \cdot 0.273 = 0.074$
 (d) $= \rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_2} = 0.342 \cdot 0.326 \cdot -0.235 = -0.026$
 (e) $= \rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = 0.342 \cdot 0.254 \cdot 0.273 = 0.023$
 (f) $= \rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_1} = -0.235 \cdot 0.326 \cdot 0.342 = -0.026$
 (g) $= \rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = -0.235 \cdot 0.344 \cdot 0.273 = -0.022$
 (h) $= \rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2x_1} = -0.273 \cdot 0.254 \cdot 0.342 = 0.023$
 (i) $= \rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2x_2} = 0.273 \cdot 0.344 \cdot -0.235 = -0.022$

Tabel IV-17. Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total SPIP, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Variabel	Pengaruh				Total
	langsung	tidak langsung			
		melalui x_1	melalui x_2	melalui y_1	
x_1 terhadap y_2	0.116		-0.026	0.023	0.113
x_2 terhadap y_2	0.055	-0.026		-0.022	0.007
y_1 terhadap y_2	0.074	0.023	-0.022		0.075
Pengaruh secara simultan					0,195
Pengaruh variabel luar					0,805

Sumber : Output SPSS, data diolah

8. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Koefien Analisis Jalur (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara parsial variabel independen yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 21.0. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \rho_{y_1x_i} = 0, y_1 \text{ tidak dipengaruhi variabel } x_i$$

$$H_1 : \rho_{y_1x_i} > 0, y_1 \text{ dipengaruhi oleh variabel } x_i$$

dimana $i = 1,2,3$

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil uji statistik t dari model sub struktur 1 yaitu sebagai berikut :

Tabel IV-18. Hasil Uji t Regresi Sub-struktur 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67,987	14,438		4,709	,000
	SPIP	,110	,084	,159	1,307	,196
	KA	,480	,200	,292	2,404	,019

a. Dependent Variable: EFSIA

Sumber : Output SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel IV-18. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) Variabel x_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) memiliki nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $1,307 < t_{tabel}$ sebesar 1,996 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.196 lebih besar dari 0.05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1 . Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel sistem

pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.

- 2) Variabel x_2 (Ketersediaan Anggaran) memiliki nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $2.406 > t_{tabel}$ sebesar 1,996 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh ketersediaan anggaran terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah

Sedangkan hasil uji statistik t dari model sub struktur 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-19. Hasil Uji t Regresi Sub-struktur 2

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,720	2,353		3,706	,000
	SPIP	,034	,012	,342	2,848	,006
	KA	-,056	,029	-,235	-1,901	,062
	EFSIA	,039	,017	,273	2,255	,028

a. Dependent Variable: K.LKPD

Sumber : Output SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel IV.19. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) Variabel x_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) memiliki nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $2.848 > t_{tabel}$ sebesar 1,996 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

- 2) Variabel x_2 (Ketersediaan Anggaran) memiliki nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $-1,901 < t_{tabel}$ sebesar $-1,996$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.062 lebih besar dari 0.05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1 . Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Variabel y_1 (Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah) memiliki nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $2,255 > t_{tabel}$ sebesar $1,996$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.028 lebih kecil dari 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh variabel efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk mengevaluasi pengaruh seluruh variabel endogen terhadap variabel eksogen secara bersama-sama (simultan) pada model analisis jalur digunakan uji F. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil uji F dari model sub struktur 1 yaitu sebagai berikut

Tabel IV-20. Hasil Uji F Regresi Sub-struktur 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	757,208	2	378,604	5,337	,007 ^b
	Residual	4610,851	65	70,936		
	Total	5368,059	67			
a. Dependent Variable: EFSIA						
b. Predictors: (Constant), KA, SPIP						

Sumber : Output SPSS, data diolah

Untuk menguji hubungan secara simultan antara variabel x_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan x_2 (Ketersediaan Anggaran) terhadap y_1 (Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah) menggunakan uji kelinieran persamaan regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-20. di atas. Berdasarkan tabel IV-20, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $5.337 > F_{tabel}$ sebesar 3.14 dan signifikansi $0.007 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran) berpengaruh terhadap variabel endogen (efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah) atau menerima H_1 .

Sedangkan hasil uji F dari model sub struktur 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-21. Hasil Uji F Regresi Sub-struktur 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,086	3	7,362	5,240	,003 ^b
	Residual	89,914	64	1,405		
	Total	112,000	67			
a. Dependent Variable: K.LKPD						
b. Predictors: (Constant), EFSIA, SPIP, KA						

Sumber : Output SPSS, data diolah

Untuk menguji hubungan secara simultan antara variabel x_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), x_2 (Ketersediaan Anggaran) dan y_1 (Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah) terhadap y_2 (Kualitas Laporan Keuangan) menggunakan uji kelinieran persamaan regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-21 di atas.

Berdasarkan tabel IV-21. diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $5,240 > F_{tabel}$ sebesar 3.14 dan signifikansi $0.003 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah) berpengaruh terhadap variabel endogen (kualitas laporan keuangan) atau menerima H_1 .

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1,307 dan t_{tabel} sebesar 1,996 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t_{tabel} lebih besar dari t_{hitung} , dan nilai signifikansi sebesar 0,196 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Secara langsung sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,025 (2,5%). Dan secara tidak langsung melalui variabel ketersediaan anggaran memberikan pengaruh sebesar 0,015 (1,5%) sehingga total pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 0,04 (4%). Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa

sistem pengendalian intern pemerintah yang telah dibangun tidak terlalu mempengaruhi efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.

Dilihat dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, secara keseluruhan sistem pengendalian intern pemerintah yang dibangun sudah memadai. Hal ini terlihat dari total skor seluruh dimensi yang dibangun yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan sudah memadai. Beberapa hal yang diduga menjadi faktor bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah bahwa sebahagian besar Pemerintah Daerah di Sumatera Utara telah menggunakan SIMDA sebagai aplikasi sistem informasi keuangan daerah.

Program aplikasi SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (BPKP, 2008). Lebih lanjut (BPKP, 2008) menjelaskan bahwa SIMDA telah didukung dengan pengendalian internal yang memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem yang dirancang melalui beberapa jenis pengendalian yaitu meliputi pengendalian akses dan wewenang user, pengendalian keamanan umum, pengendalian menu berdasarkan fungsi dan pengendalian aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa SIMDA telah dibangun

dengan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga sistem pengendalian intern pemerintah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah tidak begitu mempengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil pada penelitian ini tidak mendukung sepenuhnya penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2017; Sari, 2015; Sudirman, 2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu berdasarkan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dibangunnya SIMDA oleh BPKP yang sudah membangun sistem yang dilengkapi dengan pengendalian internal yang baik, maka pengendalian internal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat untuk melengkapi dan melakukan koordinasi dengan BPKP selaku tim yang membangun aplikasi tersebut agar penerapan sistem tersebut tetap dapat berjalan dengan efektif.

2. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh ketersediaan anggaran terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} ketersediaan anggaran sebesar 2,404 dan t_{tabel} sebesar 1,965 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,019 (lebih kecil dari 0,05) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Secara langsung ketersediaan anggaran mempengaruhi efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,085 (8,5%). Dan secara tidak

langsung melalui variabel sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh sebesar 0,015 (1,5%) sehingga total pengaruh ketersediaan anggaran terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 0,10 (10%). Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.

Dilihat dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai variabel ketersediaan anggaran pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, secara keseluruhan sebahagian besar responden setuju bahwa ketersediaan anggaran dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam mendukung efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Dari keseluruhan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Utara, sebanyak 30 daerah menggunakan aplikasi SIMDA dari BPKP dan sebanyak 4 daerah membangun sistem informasi keuangannya sendiri. Untuk tetap mendukung agar sistem informasi keuangan dimaksud dapat diterapkan dengan efektif, maka seharusnya daerah menyediakan anggaran yang akan menunjang kelancaran operasional sistem tersebut.

Dimensi sumber anggaran adalah merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber anggaran baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD sangat dibutuhkan untuk mendukung agar sistem dapat tetap berjalan dengan efektif. Ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah Daerah yang membangun sistem informasi keuangannya sendiri maupun Pemerintah Daerah

yang menggunakan SIMDA sebagai sistem informasi keuangannya. Ketersediaan anggaran ini sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional pelaksanaan sistem dimaksud, seperti pengadaan perangkat *hardware*, pelatihan sumber daya manusia, biaya perawatan, biaya jaringan internet dan yang lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Riawan, 2016) yang menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan beberapa hal seperti: kualitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. ketersediaan anggaran mempengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah, penelitian yang dilakukan oleh (Idris, 2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara ketersediaan anggaran dengan kinerja aparatur. Selanjutnya (Sudaryanti, 2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui SIKD. SIKD merupakan sarana untuk membantu penyusunan anggaran, selanjutnya anggaran yang disusun memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran.

Struktur APBD Pemerintah daerah saat ini sebahagian besar anggaran masih dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai. Sehingga pemerintah daerah sangat membutuhkan alokasi dana yang tersedia untuk menunjang kebutuhan sistem informasi keuangan daerah yang meliputi pembangunan, perawatan dan pemeliharaan sistem informasi keuangan termasuk *hardware*, *software* dan *brainware* sistem dimaksud, sehingga ketersediaan anggaran dapat mendukung efektivitas sistem informasi keuangan daerah yang akan diterapkan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil pengujian hubungan secara simultan antara variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran) terhadap variabel endogen (efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah) di peroleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 5.337 dan F_{tabel} sebesar 3,14 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,007 (lebih kecil dari 0,05) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran) berpengaruh terhadap variabel endogen (efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah).

Dengan nilai koefisien determinasi R^2 pada tabel IV-12 yaitu sebesar 0.141 maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang meliputi sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dapat menjelaskan variasi naik turunnya efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 14.1% sedangkan sisanya sebesar 85.9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berikutnya nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R²*) sebesar 0.115 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) seluruh variabel bebas yang digunakan hanya mampu menjelaskan variasi yang terjadi dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 11.5%.

Beberapa faktor yang diduga menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Menurut penelitian (Sari,

2015), faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah antara lain adalah budaya organisasi, kompetensi dan komitmen organisasional.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 2,848 dan t_{tabel} sebesar 1,996 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,006 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara langsung sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 0,116 (11,6%). Dan secara tidak langsung melalui variabel ketersediaan anggaran memberikan pengaruh sebesar -0,026 (-2,6%) dan variabel efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,023 (2,3%) sehingga total pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,113 (11,3%).

Dilihat dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara sudah memadai. Namun jika dilihat pada dimensi lingkungan pengendalian, skor rata-rata minimum terdapat pada indikator kepemimpinan yang kondusif. Hal ini terjadi karena entitas belum maksimal

dalam menjalankan fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap asset dan barang.

Pada dimensi penilaian risiko, skor minimum rata-rata terlihat pada indikator analisis risiko. Hal ini terjadi karena entitas belum melakukan analisis terhadap risiko yang mungkin akan dihadapi sehingga dapat mengakibatkan rencana tindak pengendalian terhadap risiko belum maksimal. Dalam dimensi aktivitas pengendalian, skor minimum rata-rata terdapat pada indikator pengendalian fisik asset. Berbagai permasalahan yang menyangkut tentang pencatatan dan pendataan aset masih mendominasi hampir di seluruh pemerintah daerah. Pencatatan aset yang terlambat, pendokumentasian yang tidak lengkap, serta ketidakjelasan laporan aset di tahun-tahun yang lalu merupakan masalah kompleks yang sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada dimensi informasi dan komunikasi, skor rata-rata minimum terdapat pada pengelolaan informasi. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia di pemerintah daerah belum menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Melalui penggunaan *egovernment*, efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi birokrasi pemerintahan akan tercapai. Akan tetapi, adanya resistensi terhadap perubahan khususnya dalam mengadopsi penggunaan *e-government* pada birokrasi pemerintahan umumnya dikarenakan rendahnya keinginan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan teknologi informasi seperti internet (Turnip, 2012). Selain itu juga masih ditemukan masalah tentang keterbatasan dan gangguan jaringan komunikasi seperti layanan *internet* yang terjadi di beberapa daerah. Selanjutnya pada dimensi pemantauan terlihat sudah memadai, namun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan

dari auditor internal maupun eksternal harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini bertujuan sebagai tindakan preventif dan pembinaan agar kesalahan yang sama tidak berulang di waktu yang akan datang sekaligus untuk meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan.

Hasil pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Herawati, 2014; Kurniawan, 2017; Sari, 2015; Sudirman, 2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap sistem kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu berdasarkan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah harus meningkatkan dan memastikan agar semua unsur/dimensi yang ada didalam sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh BPKP bertujuan agar semua Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah dapat melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap maturitas (tingkat kematangan) sistem pengendalian intern pemerintah di daerah tersebut. Dengan adanya regulasi ini diharapkan semua Pemerintah Daerah dapat lebih maksimal untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk tujuan akuntabilitas dan tercapainya *good governance* pada pemerintah daerah.

5. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mengenai ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} ketersediaan anggaran sebesar -1,901 dan t_{tabel} sebesar -1,996 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,062 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara langsung ketersediaan anggaran mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 0,055 (5,5%). Dan secara tidak langsung melalui variabel sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh sebesar -0,026 (-2,6%) dan variabel efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar -0,022 (2,2%) sehingga total pengaruh ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,007 (0,7%).

Dilihat dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai variabel ketersediaan anggaran pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, skor minimum rata-rata terlihat pada dimensi kemampuan pengelolaan anggaran yaitu pada indikator kinerja anggaran. Hal ini berarti pemerintah daerah belum tepat dalam penyusunan tujuan dari setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini yang mengakibatkan anggaran yang dilaksanakan belum memiliki *input*, *output* dan *outcome* yang jelas dan tepat. Sehingga anggaran berbasis kinerja belum dapat memiliki dampak yang terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga hal ini yang mengakibatkan pengaruh negatif

terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hal ini adalah menyediakan / mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pelatihan sumber daya manusia tentang pengelolaan anggaran dan menyusun penganggaran berbasis kinerja sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

6. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mengenai efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 2,255 dan t_{tabel} sebesar 1,996 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,028 (lebih kecil dari 0,05) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara langsung efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 0,074 (7,4%).

Dilihat dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai variabel efektivitas penerapan sistem informasi keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, skor rata-rata minimum pada indikator sistem yang fleksibel. Hal ini berarti sistem informasi keuangan yang digunakan tidak mudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kompleksitas yang terjadi pada

struktur organisasi birokrasi membuat proses perubahan tidak dapat terjadi dengan cepat.

Pada dimensi kualitas informasi, skor rata-rata minimum terdapat pada indikator tepat waktu, hal ini berarti sistem informasi keuangan belum dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dari hasil penelitian yang dilakukan hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya antara aplikasi SIMDA keuangan dengan SIMDA barang. Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dengan tepat waktu, pengguna harus melakukan penginputan kembali pencatatan aset pada aplikasi SIMDA keuangan agar dapat menghasilkan neraca sebagai salah satu komponen dalam laporan keuangan. Sehingga ini membutuhkan waktu dan proses yang lama.

Selanjutnya pada dimensi penggunaan sistem, skor minimum rata-rata terlihat pada indikator kemudahan sistem. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia masih belum maksimal dalam penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer. Menurut (Turnip, 2012) pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi serta kendala budaya merupakan hambatan dalam mengimplementasikan penggunaan *e-government*. Selain itu di beberapa daerah, kendala terhadap jaringan internet mempengaruhi kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem dikarenakan sistem informasi yang digunakan sudah tersinkronisasi dengan jaringan *internet* antara *database server* (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ke *database client* (Organisasi Perangkat Daerah).

Pada dimensi dampak individual, responden menyatakan bahwa secara keseluruhan penggunaan sistem informasi keuangan daerah sudah baik. Dengan

menggunakan sistem informasi, pengguna (*user*) lebih dapat mengefektifkan waktu dalam melaksanakan tugas dan memberikan manfaat dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal yang harus ditingkatkan pada dimensi ini adalah harus dilakukannya sosialisasi terhadap pengguna atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan ataupun perubahan sistem, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik.

Selanjutnya pada dimensi yang terakhir yaitu dampak organisasi, tanggapan responden atas dampak yang ditimbulkan atas penerapan sistem informasi keuangan daerah sudah baik, baik dari sisi efektivitas informasi yang dihasilkan maupun dari sisi efisiensi biaya. Pemerintah Daerah yang menggunakan SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP tidak perlu mengeluarkan biaya atas pembuatan, perawatan dan permasalahan yang timbul pada sistem informasi, dikarenakan semua permasalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BPKP. Namun sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan daerah dapat membangun sistem yang terintegrasi secara elektronik mulai dari perencanaan dan penganggaran yang diimplementasikan dengan aplikasi *e-planning*, *e-Budgeting*, *e-Project Planning*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, *e-Controlling*, *e-payment*, dan *e-Performance* (Pemerintah Provinsi Sumut, 2018). Dengan membangun sistem informasi keuangan sendiri yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (P. R. Indonesia, 2005a), diharapkan daerah dapat lebih fleksibel untuk menyesuaikan

kebutuhan atas informasi yang diperlukan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Sari, 2015) yang menyatakan bahwa kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian (Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, 2012) menyatakan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado berperan penting dalam mendukung operasional SKPKD, mulai dari bidang penganggaran, akuntansi sampai pada perbendaharaan. Kecuali untuk efektifitas dan efisiensi tugas pemerintahan dalam hal konektivitas dan integrasi aplikasi sistem informasi dan komunikasi masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Ketersediaan Anggaran, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hubungan secara simultan antara variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah) terhadap variabel endogen (kualitas laporan keuangan) di peroleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 5.240 dan F_{tabel} sebesar 3,14 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar 0,003 (lebih kecil dari 0,05) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel eksogen (sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektifitas penerapan

sistem informasi keuangan daerah) berpengaruh terhadap variabel endogen (kualitas laporan keuangan). Secara simultan variabel sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 0,195 (19,5%). Dan sebesar 0,805 (80,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa faktor yang diduga menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian (Widyarani, 2015) menyatakan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Dan pada penelitian (Suwanda, 2015) menyatakan bahwa secara simultan variabel sistem akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya pada penelitian (Yuliani, 2010) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga kesimpulan yang diambil pada penelitian ini bahwa perlu adanya peningkatan terhadap aspek sistem pengendalian intern, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

8. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara langsung pengaruh efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,074 (7,4%), pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 0,023 (2,3%), dan pengaruh ketersediaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar -0,022 (-2,2%). Sehingga total pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran melalui efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 0,075 (7,5%). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan variabel perantara yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Sumatera Utara. Beberapa hal yang lebih harus ditingkatkan lagi agar sistem informasi keuangan dapat diterapkan dengan efektif adalah dengan yaitu dengan adanya komitmen dari pimpinan, analisis terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam penerapan sistem informasi keuangan, pengintegrasian sistem pencatatan aset dari sistem informasi barang ke sistem informasi keuangan, pengelolaan informasi yang lebih baik lagi dan menindaklanjuti hal-hal yang ditemukan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini berarti dengan penggunaan aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sistem informasi keuangan daerah, maka pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.
2. Ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini berarti agar pemerintah daerah dapat menerapkan sistem informasi keuangan daerah dengan efektif, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang mendukung untuk operasional pelaksanaan sistem informasi dimaksud.
3. Sistem pengendalian internal dan ketersediaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.

4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti dengan sistem pengendalian intern yang baik, maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
5. Ketersediaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa kemampuan dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga hal ini yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.
6. Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan berfungsi sebagai alat yang efektif yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
7. Sistem pengendalian internal, ketersediaan anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Sistem pengendalian internal dan ketersediaan anggaran melalui efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah. Melalui inspektorat sebagai unit yang berfungsi menjalankan aspek pengendalian intern pemerintah, maka penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap indeks maturitas harus dilaksanakan dengan lebih baik lagi secara komprehensif dan terintegrasi pada semua *stakeholder* yang mendukung dimensi-dimensi pada sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah di Sumatera Utara dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang tercermin melalui opini yang diberikan oleh BPK-RI.
2. Dari segi ketersediaan anggaran, diharapkan agar pemerintah daerah dapat tetap mengalokasikan anggaran untuk menunjang kebutuhan yang berkaitan dengan operasional pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, biaya pelatihan untuk pengguna, biaya sosialisasi dan biaya pengendalian/monitoring untuk mengatasi risiko yang mungkin atas penerapan sistem informasi dimaksud.
3. Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan suatu instrumen (*tools*) yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah baik

yang menggunakan SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sistem informasi keuangannya maupun yang membangun sistem informasi keuangannya sendiri harus tetap memastikan agar penerapan sistem tersebut berjalan dengan efektif dengan memperhatikan seluruh aspek yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, dampak individual dan dampak organisasi berjalan dengan baik, yaitu dengan cara melengkapi sistem informasi keuangan dengan program yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan sampai kepada pelaporan. Pengembangan aplikasi secara dinamis dan fleksibel adalah hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, Adanya sinkronisasi pencatatan antara sistem informasi barang dan sistem informasi keuangan dapat membantu untuk mengintegrasikan laporan barang dan keuangan sehingga lebih memudahkan untuk menghasilkan neraca sebagai salah satu unsur dalam laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Penelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan, seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen pimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan temuan yang lebih bervariasi untuk melengkapi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, M. S. B. (2010). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Prentice Hall.
- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, V. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen* (Jilid 2). Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Arfianti, D. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*.
- Ayuni, N. M. K., & Erawati, N. M. A. (2018). Pengaruh Asimetri Informasi Pada Senjangan Anggaran Dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 492–520.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p19>
- Bae, B., Epps, R. W., & Gwathmey, S. S. (2003). Internal Control Issues : The Case of Changes to Information Processes. *Information Systems Control Journal*, 4(804).
- Basukianto, F. C. P. ; (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), 22(2), 188–200.
- Bodnar, George H., W. S. H. (2010). *Accounting Information System*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- BPKP, S. P. S. (2008). *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Satgas Pengembangan SIMDA 2008. SIMDA dan Penerapannya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Brink, A. (2011). *Corporate Governance and Business Ethies*. New York: Springer.
- Brodjonegoro, B. P. (2009, August 18). Laporan Keuangan Daerah Kabar Buruk Dari Otonomi Daerah. *Kompas*.
- DeLone, W. H. dan E. R. M. L. (1992). *Information System Success : The Quest for the Dependent Variable*.
- Edition, T., & Traver, C. G. (2012). *Management Information System Laudon* 12th Edition Pdf.

- Efendi, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 182–195.
- Elvira Zeyn. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–14.
- Farhoomand, A. F. (1998). A Hierarchical Structural Model Of Information Systems Success AU - Drury, D.H. *INFOR: Information Systems and Operational Research*, 36(1–2), 25–40. <https://doi.org/10.1080/03155986.1998.11732341>
- Fauzi, G. (2011, November 9). Mendagri Kritik Buruknya Pelaporan Keuangan Daerah. *Okezone*.
- H. Sajady, Ph.D. ; M. Dastgir, Ph.D ; H. Hashem Nejad, M. S. (2008). Evaluation Of The Effectiveness Of Accounting Information Systems. *International Journal of Information Science and Technology*, 6(2), 115–124. [https://doi.org/10.1016/S0035-9203\(36\)90018-4](https://doi.org/10.1016/S0035-9203(36)90018-4)
- Hall, J. A. (2004). *Accounting Information Systems 9E*. South Western: Thomson.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14. <https://doi.org/1693-4482>
- Horner, F. W. dan D. (2010). *Business Accounting Basics*. Pearson Education Limited.
- Huda, P. A., Ekawati, R. K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Palembang), (x), 1–14.
- Idris, A. (2013). Pengaruh Ketersediaan Anggaran Dan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan*, 2(4), 28–36.
- Iman Bastari (Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah, 1–22.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

- .(2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- . (2005a). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.*
- . (2005b). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- . (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 282.*
- . (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ir. H. Dede Hermasah, M. S. (2008). Tanpa Dukungan Ketersediaan Anggaran Rencana Pembangunan Tak Akan Bisa Diwujudkan.
- Ismail, N. A. (2009). Factors Influencing AIS Effectiveness Among Manufacturing SMEs: Evidence From Malaysia. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 38(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2009.tb00273.x>
- Jayamaha, A. (2014). Budgetary Process and Organizational Performance of Apparel Industry in Sri Lanka Budgetary Process and Organizational Performance of Apparel Industry in Sri Lanka, (August 2012).
- Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, H. M. (2012). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado, 72–83.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *12(2)*, 201–214.
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kaimenakis, Cohen Sandra, N. (2011). Assessing Quality of Financial Reporting through Audit Reports ; The Case of Greek Municipalities. *Global Bussiness and Economics Review*, 187–203.
- Kaplan, S. D. P. ; R. M. (2005). *Psychological Testing, Principles, Applications. And Issues* (6th ed.). Belmont USA: Thomson Wadsworth.

- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa ke Masa*.
- Kurniawan, A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, *XIV*(2), 1–12.
- Lia, Wawan. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, 4(1). <https://doi.org/1907-9958>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 1–17.
- (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martina, K. A. (2012). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat), (17).
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S. (2016). Menkeu Sri Mulyani Sebut Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP Tapi Kepala Daerahnya Korupsi. Retrieved January 12, 2019, from www.medantribunnews.com
- Nazir, D. M. (2009, April 28). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Makin Buruk. *Workshop Pemaparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2008*.
- Nugraha, D. S. (2010). The Influence Of Internal Control System To The Reliability Of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Ekspansi Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 2(2), 3.
- Nurhayati, I. F. I. D. (2013). Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektivitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Malang. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(April), 95–107.

- Nurilah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi , (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *JOM FEKON Universitas Diponegoro*.
- Nuryanto, M., & Afiah, N. N. (2013). The Impact of Apparatus Competence , Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia), 3(4), 157–171.
- Pardede, R., & Manurung, R. (2014). *Analisis Jalur: Teori dan Aplikasi dalam Riset Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Provinsi Sumut. (2018). Sumut Provinsi Terbaik Pemberantasan Korupsi. Retrieved from <http://humas.sumutprov.go.id/sumut-provinsi-terbaik-pemberantasan-korupsi/>
- Prof. Erlina, Omar Sakti Rambe, R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Rai, I. G. A. (2010). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29–39.
- Riawan. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara. *JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115*, 8(1), 50–60.
- Rick Hayes, Roger Dassen, A. S. and P. W. (2005). *Principle of Auditing, An Introduction to International On Auditing*. Prentice Hall Pearson Education Limited.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (n.d.). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung), 33–67.
- Rutherford, M. K. C. dan R. D. (1993). *Statistical Model for Causal Analysis*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Sari, E. N. (2015). *The Influence of Governmet Internal Control System, Organizational Culture, Competency And Organizational Comitment On The Accounting Information System Implementation's Success And It's Implication On The Financial Statements Quality*. Universitas Padjajaran.

- Silviana. (2013). Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di Provinsi Jawa Barat), 30–31.
- Simanjuntak, B. H. (2012). SPIP Mampu Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemda. Retrieved from www.bpkp.go.id
- Suarmika, I. G. L., & Suputra, I. D. G. D. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten KarangAsem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.9, 2921–2950.
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus : Pemda Kab. Kudus), 12, 11–24.
- Sudirman, M. S. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas (BMA Executive Travel Makassar).
- Sugiyono. (2005). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (1987). *Akuntansi Biaya : Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk* (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPF Universitas Gajah Mada.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi : Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan* (Cetakan Pe). Bandung: Lingga Jaya.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), 6(4), 139–158.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis*, 14(25), 26–44. <https://doi.org/10.1080/10587250210796>
- Turnip, K. (2012). *Prokontra & Resistensi terhadap ICT/E-Government Perspektif Psikologi Birokrasi* (Kedua). Yogyakarta: Elmatara.
- Upabayu, I. P., Mahaputra, R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2, 230–244.

Van Beest, F., Braam, G., & Boelens, S. (2009). Quality of Financial Reporting : measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Working Paper 09-108*, (April), 1–41. Retrieved from www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf

Widarjono, A. (2015). *Amalisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widyaningsih, A., Indonesia, U. P., Triantoro, A., Indonesia, U. P., & Wiyantoro, L. S. (2011). Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel, (January 2016).

Widyarini, K. (2015). *Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.

William H. DeLone and Ephraime R. McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information System Success. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>

Yuliani, S. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh), 3(2).

LAMPIRAN

**FORM
A**

No. :

KUESIONER PENELITIAN

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

2. Inspektorat Daerah

di-

Tempat.

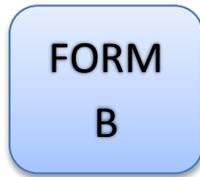
Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Dr. Eka Nurmalasari, M.Si. Ak, CA dan Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si dengan judul penelitian : *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara)”*, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner terlampir.

Atas bantuan serta kerjasama yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk pengisian kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

Nunung Sri Wahyuni



IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Pendidikan Terakhir : S-1 S-2 S-3
5. Masa Kerja : < 5 Thn 5-10 Thn 10-15 Thn >15 Thn
6. Jabatan saat ini :
7. Lama menjabat :

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, oleh sebab itu semua pilihan jawaban dan pendapat yang Bapak/Ibu berikan akan menjadi kerahasiaan oleh peneliti.
2. Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Setiap pernyataan diberikan 5 (lima) buah alternatif jawaban, dengan kriteria sebagai berikut :

- SM	: Sangat Memadai	- SS	: Sangat Setuju
- M	: Memadai	- S	: Setuju
- CM	: Cukup Memadai	- CS	: Tidak Setuju
- KM	: Kurang Memadai	- KS	: Sangat Tidak Setuju
- TM	: Tidak Memadai	- TS	: Sangat Setuju

- SB	: Sangat Baik
- B	: Baik
- CB	: Cukup Baik
- KB	: Kurang Baik
- TB	: Tidak Baik
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian jawaban dan akan melakukan perubahan jawaban, maka dapat mencoret dengan garis dua (==) pada jawaban semula dan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

**FORM
C**

INFORMASI UMUM

1. Komputer yang digunakan dalam mengerjakan tugas sehari-hari di lingkungan kerja adalah :

<i>Personal Computer</i> khusus yang disediakan hanya untuk Bapak/Ibu	
<i>Personal Computer</i> yang digunakan secara bersama dan bergantian dengan personal lainnya	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

2. Program aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang Bapak/Ibu gunakan saat ini :

Nama Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang digunakan Pemda Bapak/Ibu :	
Dikembangkan sendiri oleh Pemda	
Dikembangkan oleh instansi di luar instansi Pemda Bapak/Ibu	
Menyewa aplikasi dari pihak luar (<i>outsourcing</i>)	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

3. Usia program aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang saat ini digunakan

Kurang dari 1 tahun	
Sudah digunakan selama 1 – 3 tahun	
Sudah digunakan selama 3 – 5 tahun	
Sudah digunakan selama > 5 tahun	

4. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kelancaran penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (dapat diberikan jawaban lebih dari satu, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia) :

<i>WiFi</i>	
Jaringan internet khusus	
UPS	
Ruang khusus untuk aplikasi SIKD	
Petugas khusus layanan (<i>helpdesk</i>) yang memberikan pelayanan setiap saat jika terjadi pemeliharaan dan perbaikan program SIKD	
Lainnya (sebutkan jika ada)	

5. Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan fasilitas yang digunakan :

Dilakukan sendiri oleh instansi Bapak/Ibu	
Dilakukan secara sentralisasi oleh OPD yang khusus menangani tentang Teknologi Informasi (Diskominfo)	
Dilakukan oleh jasa yang disediakan pihak luar instansi	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

FORM D

KUESIONER PENELITIAN

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH						
Lingkungan Pengendalian		SM	M	CM	KM	TM
1	Pemerintah Daerah telah memiliki kode etik yang komprehensif.					
2	Tindakan disiplin atau sanksi atas pelanggaran disampaikan kepada instansi yang mengurus masalah kepegawaian					
3	Pemerintah Daerah memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu					
4	Pemerintah Daerah memiliki ketentuan yang jelas mengenai kapan seorang pegawai dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi					
5	Pemerintah daerah memandang penting fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap asset/barang					
6	Pemerintah Daerah sudah memiliki unit yang menjalankan fungsi akuntansi.					
7	Struktur organisasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sudah lengkap					
8	Para pejabat struktural di semua unit memiliki keleluasaan dalam berkomunikasi dengan pimpinan					
9	Setiap pegawai di Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab					
10	Pemerintah Daerah memiliki Standar Operasional dan Prosedur, baik dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah maupun operasional sehari-hari					
11	Pemerintah Daerah memiliki ketentuan yang jelas mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang ada					
12	Pegawai memiliki kategori dalam penilaian kinerja					
13	Pegawai memahami bahwa kinerja yang buruk berdampak terhadap organisasi					
14	Inspektorat daerah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan dan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah					
15	Inspektorat daerah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah					
16	Inspektorat daerah memberikan peringatan dini terdapa manajemen resiko					
17	Adanya koordinasi antar instansi di Pemerintah Daerah dalam mencapai kinerja.					
Penilaian Risiko		SM	M	CM	KM	TM
18	Pemerintah daerah melakukan identifikasi risiko					
19	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen					
20	Pemerintah daerah sudah menganalisis risiko					
21	Kinerja ditetapkan berbasis manajemen risiko					
22	Ada upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi risiko					
23	Ada regulasi untuk mengatasi resiko					

Aktivitas Pengendalian		SM	M	CM	KM	TM
24	Ada mekanisme untuk mereview kinerja					
25	Terdapat dokumen untuk mereview kinerja					
26	Setiap transaksi dicatat secara memadai					
27	Media untuk pencatatan dokumen tersedia dengan baik					
28	Pencatatan seluruh asset telah dilakukan secara memadai					
29	Pelaporan asset dilakukan secara berkala					
30	Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan					
31	Transaksi yang diakui hanya transaksi yang valid yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah					
32	Pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran					
Informasi dan Komunikasi		SM	M	CM	KM	TM
33	Terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai					
34	Pimpinan mendukung pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang memadai					
35	Tugas dan tanggung jawab dikomunikasikan melalui media yang memadai					
36	Terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan					
Pemantauan		SM	M	CM	KM	TM
37	Pemerintah daerah memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan					
38	Data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya					
39	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan					

KETERSEDIAAN ANGGARAN						
Sumber Anggaran		SS	S	CS	KS	TS
1	Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBN adalah penting dialokasikan setiap tahun untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah					
2	Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi adalah penting dialokasikan setiap tahun untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah					
3	Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD penting dialokasikan untuk kegiatan sistem informasi					
4	Pentingnya menambah APBD setiap tahun untuk menunjang perawatan sistem informasi					
5	Sumber anggaran APBD secara khusus diprioritaskan untuk pembangunan sistem informasi					
Alokasi Anggaran		SS	S	CS	KS	TS
6	Anggaran telah disusun sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan					
7	Adanya anggaran yang tersedia untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.					
8	Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi secara rutin setiap tahunnya					
9	Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk aktivitas pengendalian internal dan tunjangan yang memadai untuk sumber daya manusia yang terkait dalam aktivitas pengendalian					
10	Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pelatihan dalam pembuatan laporan keuangan secara rutin setiap tahunnya					
Kemampuan Dalam Pengelolaan Anggaran		SS	S	CS	KS	TS
11	Anggaran yang disusun memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.					
12	Tersedia standar operasional prosedur dalam penyusunan anggaran					
13	Anggaran yang disusun memiliki indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan					
14	Pengelola anggaran memahami dan mengetahui prosedur dalam penyusunan anggaran					
15	Anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah selalu dialokasikan secara rutin setiap tahun.					

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI						
Kualitas Sistem		SB	B	CB	KB	TB
1	Sistem informasi keuangan yang di gunakan membuat saya menjadi lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan.					
2	Sistem informasi keuangan yang digunakan dengan mudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi					
3	Sistem informasi keuangan yang digunakan terintegrasi dengan aktivitas yang lain yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah					
4	Sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah					
Kualitas Informasi		SB	B	CB	KB	TB
5	Sistem informasi keuangan menghasilkan informasi yang akurat dan lengkap					
6	Informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan					
7	Sistem informasi keuangan menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu					
8	Sistem informasi keuangan dapat menyajikan laporan setiap saat					
9	Informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan					
10	Informasi yang dihasilkan <i>uptodate</i>					
11	Sistem informasi keuangan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam bekerja.					
Penggunaan Sistem		SB	B	CB	KB	TB
8	Sistem informasi keuangan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.					
9	Sistem informasi tidak memerlukan proses yang lambat dalam menyajikan laporan					
10	Sistem informasi membantu dalam melaksanakan pekerjaan					
11	Sistem informasi mudah digunakan					
12	Saya selalu meggunakan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan					
13	Saya sering menggunakan sistem informasi					
14	Setiap hari saya selalu terlibat dalam penggunaan sistem					
15	Penggunaan sistem informasi bisa diakses kapanpun					
16	Penggunaan sistem informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang					
Kepuasan Pemakai		SB	B	CB	KB	TB
12	Saya memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dengan sistem informasi yang tersedia					
13	Saya tidak merasa bosan dan nyaman dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan menggunakan sistem informasi keuangan					
14	Saya merasa sistem informasi keuangan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dalam bekerja					
15	Sistem informasi keuangan yang digunakan membuat saya bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas					
16	Sistem informasi keuangan yang digunakan memberikan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan pekerjaan					

Organizational Impact		SB	B	CB	KB	TB
17	Informasi yang disajikan lebih cepat					
18	Informasi yang disajikan sangat berguna untuk organisasi					
19	Biaya operasional atas sistem sangat efisien					
20	Dengan pengimplementasian sistem, biaya operasional pemerintah daerah yang timbul dalam hal pengelolaan informasi keuangan daerah menjadi lebih efisien dan efektif.					

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						
Relevan		SS	S	CS	KS	TS
1	Opini yang diberikan oleh BPK-RI mencerminkan keandalan laporan keuangan					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
Reliable (Andal)		SS	S	CS	KS	TS
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
Timeliness		SS	S	CS	KS	TS
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK adalah sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan					

TABULASI JAWABAN KUESIONER RESPONDEN

No. Resp	SPIP																																						Total				
	LP																	PR					AP						IK				P										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39			
001-1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	165		
001-2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	135		
002-3	3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	162		
002-4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	141		
003-5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	154	
003-6	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	154		
004-7	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	161		
004-8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	156	
005-9	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	147	
005-10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	152	
006-11	2	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	2	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	147	
006-12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	153	
007-13	4	4	5	3	2	5	5	4	5	3	5	4	4	5	3	2	5	5	4	5	3	5	3	5	4	4	5	3	2	5	5	4	5	3	5	3	5	5	5	5	161		
007-14	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	157	
008-15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	156	
008-16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	146		
009-17	4	3	2	2	1	2	2	3	3	2	4	4	3	2	2	1	2	2	3	3	2	4	5	5	4	3	2	2	1	2	2	3	3	2	4	4	5	5	4	4	112		
009-18	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	147	
010-19	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	147	
010-20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	156	
011-21	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	144	
011-22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	159	
012-23	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	141	
012-24	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	157	
013-25	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	147	
013-26	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	149	
014-27	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	144
014-28	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	134	
015-29	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	166	
015-30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	156	
016-31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	159	
016-32	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	143	
017-33	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	148	
017-34	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	165	
018-35	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	186
018-36	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	173	
019-37	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	170	
019-38	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	180	

LANJUTAN TABULASI JAWABAN KUESIONER RESPONDEN

KETERSEDIAAN ANGGARAN (KA)															EF SIA														K-LKPD					TKS																		
SA					AA					KA					Total	KS				KI				PS						KP					OI				Total	RA				TKS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26		27	28	29	Total	1	2	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	125	4	4	4	5	367				
5	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	3	3	58	4	5	4	4	5	4	4	4	5	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	125	3	3	4	5	333						
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	106	4	4	4	4	342							
5	4	4	3	3	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	55	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	5	4	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	99	4	3	4	4	310			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	5	3	4	4	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	4	3	3	109	3	3	3	4	336			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	102	5	4	3	4	317			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	58	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	131	4	4	4	4	366					
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	56	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	104	4	4	4	4	332			
5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	61	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	118	3	3	3	4	339			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	72	4	4	4	5	3	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	3	5	4	4	5	4	5	3	5	3	3	5	3	3	121	3	3	3	4	358		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	59	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	118	3	3	4	4	338		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	58	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	3	4	4	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	4	3	3	109	4	3	4	4	335		
1	2	4	5	4	1	1	2	4	5	4	4	4	4	4	48	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	132	4	4	3	4	356			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	5	4	4	4	2	4	4	3	3	5	4	4	4	2	4	5	4	4	5	4	4	4	2	4	4	3	4	4	110	4	4	3	4	342			
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	70	5	4	5	4	3	5	2	3	3	4	4	5	4	5	4	3	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	5	2	3	3	116	3	3	3	4	355
4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	3	3	3	3	54	5	4	3	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	4	3	5	4	3	5	4	3	5	4	3	5	4	3	4	3	4	110	3	3	3	4	323	
3	3	5	5	4	3	3	3	5	5	4	5	3	5	4	60	4	5	5	4	2	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	123	4	4	4	4	311			
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	56	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	107	4	3	4	4	325		
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	56	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	4	4	3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	4	4	97	3	4	4	4	315	
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	56	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	109	4	4	4	4	337	
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	55	4	3	3	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	92	3	4	3	4	305
5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	67	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	108	4	4	3	4	349	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	110	4	4	3	4	326	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	114	3	4	3	4	345	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	57	4	4	3	4	4	2	2	4	4	3	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	101	4	4	3	4	320			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	104	3	4	3	3	326		
5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	67	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	112	4	4	3	4	338		
4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	54	5	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	5	4	3	3	4	3	5	4	3	5	4	3	5	4	3	3	4	3	3	4	105	3	3	3	4	306
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	62	4	4	4	4	5	4	2	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	5	115	4	4	3	3	357
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116	4	4	3	3	346	
4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	61	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	110	4	4	3	4	345			
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	56	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	100	4	4	3	3	313		
3	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	3	3	3	4	62	4	4	5	4	5	5	2	3	5	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	2	3	5	121	4	4	3	4	346		
5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	66	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	122	4	3	3	3	366		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	74	4	4	5	5	5	5	2	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	2	3	5	126	5	5	4	4	404				
4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	64	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	113	5	4	4	4	367			
4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	66	5	4	4	5	4	4	2	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	2	3	4	118	5	4	4	4	371		
4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5																																						

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptives

		Notes
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SPIP KA EFSIA K.LKPD TOTAL /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP	68	112	186	151,93	12,979
KA	68	45	74	60,34	5,449
EFSIA	68	92	132	113,62	8,951
K.LKPD	68	12	18	15,00	1,293
TOTAL	68	305	404	340,88	20,882
Valid N (listwise)	68				

UJI NORMALITAS

NPAR TESTS

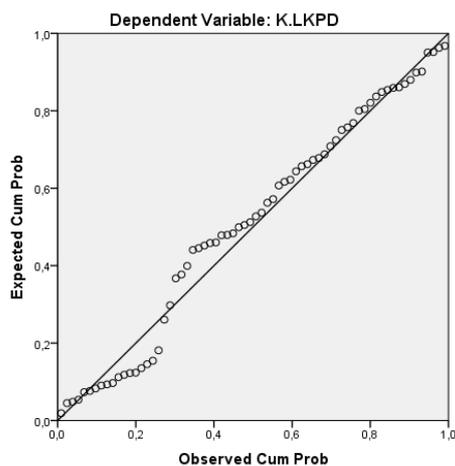
/K-S(NORMAL)=SPIP KA EFSIA K.LKPD TOTAL
/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

		Notes
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax		NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=SPIP KA EFSIA K.LKPD TOTAL /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02
	Number of Cases Allowed ^a	98304

a. Based on availability of workspace memory.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



[DataSet0]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SPIP	KA	EFSIA	K.LKPD	TOTAL
N		68	68	68	68	68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	151,93	60,34	113,62	15,00	340,88
	Std. Deviation	12,979	5,449	8,951	1,293	20,882
Most Extreme Differences	Absolute	,074	,113	,068	,147	,081
	Positive	,074	,113	,048	,147	,081
	Negative	-,068	-,081	-,068	-,147	-,062
Kolmogorov-Smirnov Z		,613	,932	,558	1,213	,669
Asymp. Sig. (2-tailed)		,847	,350	,914	,106	,761

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HUBUNGAN KORELASI ANTARA VARIABEL X1 DAN X2

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=SPIP KA
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

		Notes
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet0 <none> <none> <none>
Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	68 User-defined missing values are treated as missing. Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=SPIP KA /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time Elapsed Time	00:00:00.02 00:00:00.02

[DataSet0]

Correlations

		SPIP	KA
SPIP	Pearson Correlation	1	,326**
	Sig. (2-tailed)		,007
	N	68	68
KA	Pearson Correlation	,326**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	
	N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HUBUNGAN KORELASI ANTARA X1 , X2 DAN Y1

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=SPIP KA EFSIA
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

		Notes
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet0 <none> <none> <none>
Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	68 User-defined missing values are treated as missing. Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=SPIP KA EFSIA /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time Elapsed Time	00:00:00.02 00:00:00.01

[DataSet0]

Correlations

		SPIP	KA	EFSIA
SPIP	Pearson Correlation	1	,326**	,254*
	Sig. (2-tailed)		,007	,036
	N	68	68	68
KA	Pearson Correlation	,326**	1	,344**
	Sig. (2-tailed)	,007		,004
	N	68	68	68
EFSIA	Pearson Correlation	,254*	,344**	1
	Sig. (2-tailed)	,036	,004	
	N	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

REGRESI MODEL SUB STRUKTUR 1

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT EFSIA
  /METHOD=ENTER SPIP KA
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) .

```

Regression

Notes	
Output Created	
Comments	
Input	Active Dataset
	Filter
	Weight
	Split File
	N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling	Definition of Missing
	Cases Used
Syntax	
Resources	Processor Time
	Elapsed Time
	Memory Required
	Additional Memory Required for Residual Plots

Notes		
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT EFSIA /METHOD=ENTER SPIP KA /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED).
Resources	Processor Time	00:00:00.34
	Elapsed Time	00:00:05.20
	Memory Required	1684 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	232 bytes

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KA, SPIP ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: EFSIA
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,376 ^a	,141	,115	8,422

- a. Predictors: (Constant), KA, SPIP
 b. Dependent Variable: EFSIA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	757,208	2	378,604	5,337	,007 ^b
	Residual	4610,851	65	70,936		
	Total	5368,059	67			

- a. Dependent Variable: EFSIA
 b. Predictors: (Constant), KA, SPIP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67,987	14,438		4,709	,000
	SPIP	,110	,084	,159	1,307	,196
	KA	,480	,200	,292	2,404	,019

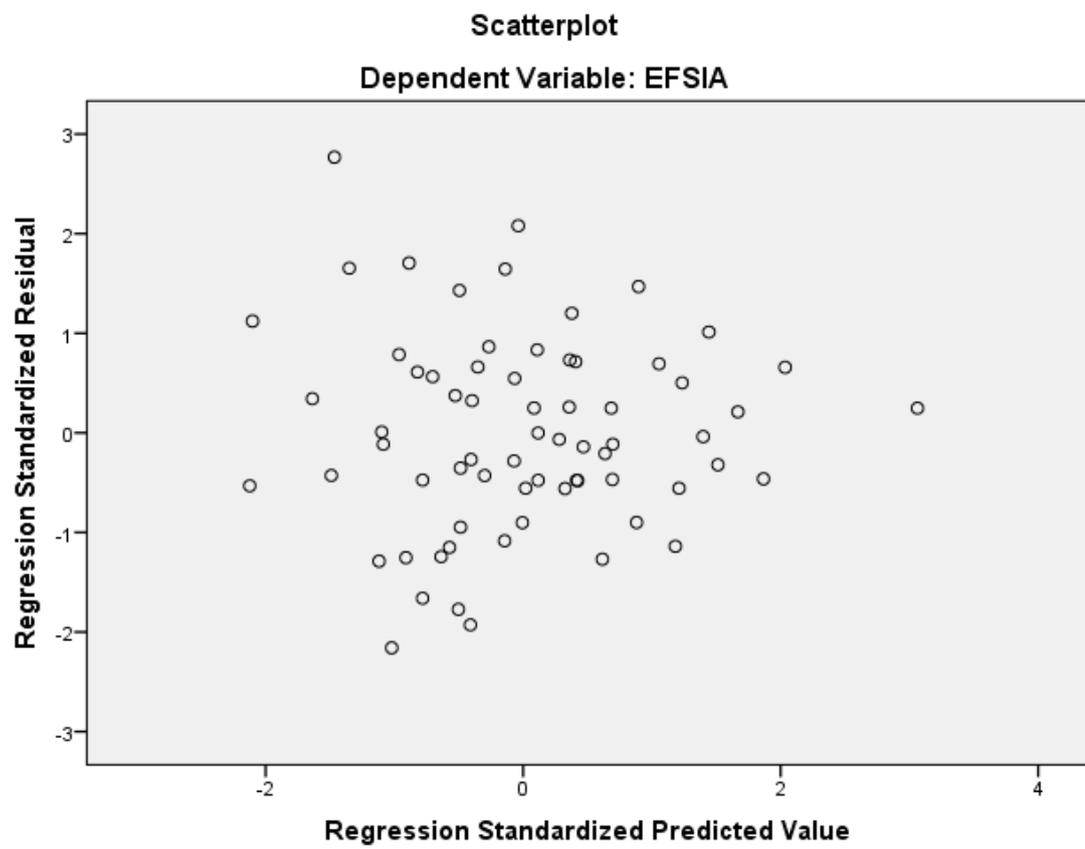
- a. Dependent Variable: EFSIA

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	106,48	123,91	113,62	3,362	68
Residual	-18,185	23,312	,000	8,296	68
Std. Predicted Value	-2,123	3,063	,000	1,000	68
Std. Residual	-2,159	2,768	,000	,985	68

- a. Dependent Variable: EFSIA

Charts



REGRESI SUB STRUKTUR-2

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT K.LKPD
  /METHOD=ENTER SPIP KA EFSIA
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) .

```

Regression

Notes	
Output Created	
Comments	
Input	Active Dataset
	Filter
	Weight
	Split File
	N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling	Definition of Missing
	Cases Used
Syntax	
Resources	Processor Time
	Elapsed Time
	Memory Required
	Additional Memory Required for Residual Plots

Notes

Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT K.LKPD /METHOD=ENTER SPIP KA EFSIA /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED).
Resources	Processor Time	00:00:00.33
	Elapsed Time	00:00:01.20
	Memory Required	1980 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	224 bytes

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	EFSIA, SPIP, KA ^b		Enter

- a. Dependent Variable: K.LKPD
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444 ^a	,197	,160	1,185

- a. Predictors: (Constant), EFSIA, SPIP, KA
b. Dependent Variable: K.LKPD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,086	3	7,362	5,240	,003 ^b
	Residual	89,914	64	1,405		
	Total	112,000	67			

- a. Dependent Variable: K.LKPD
b. Predictors: (Constant), EFSIA, SPIP, KA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,720	2,353		3,706	,000
	SPIP	,034	,012	,342	2,848	,006
	KA	-,056	,029	-,235	-1,901	,062
	EFSIA	,039	,017	,273	2,255	,028

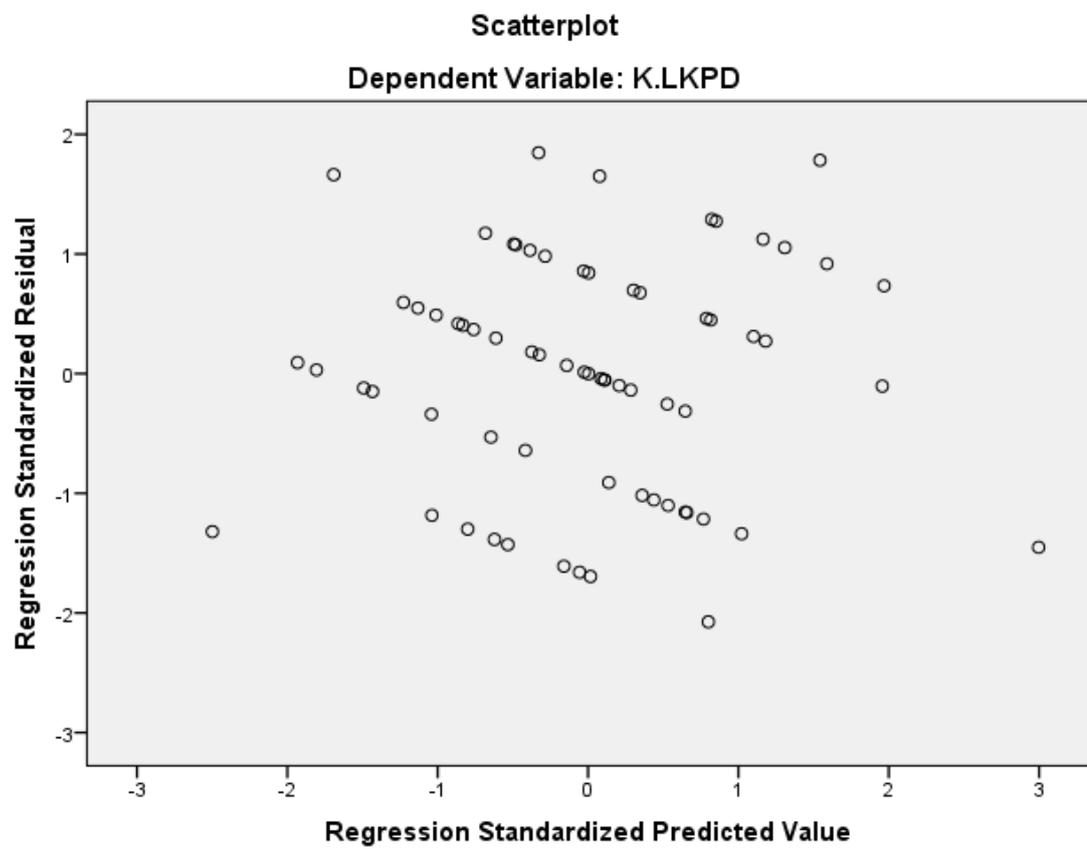
- a. Dependent Variable: K.LKPD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,57	16,72	15,00	,574	68
Residual	-2,459	2,189	,000	1,158	68
Std. Predicted Value	-2,499	2,997	,000	1,000	68
Std. Residual	-2,075	1,847	,000	,977	68

- a. Dependent Variable: K.LKPD

Charts





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denal No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
 Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
 E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : NUNUNG SRI WAHYUNI
 NPM : 1720050023
 Prog. Studi/Peminatan : Magister Akuntansi /Akuntansi Sektor Publik
 Judul Tesis : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se- Sumatera Utara)

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : _____

Pembimbing II : _____

Penguji I : _____

Penguji II : _____

Penguji III : _____

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 21 Maret 2019

1. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA
 Pembimbing I

2. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.
 Pembimbing II

3. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
 Penguji I

4. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
 Penguji II

5. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.
 Penguji III